

PEMERINTAH KOTA CIREBON

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA CIREBON



2017



IKHTISAR

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Cirebon Tahun 2017 merupakan wujud pertanggungjawaban pelaksanaan Perencanaan Strategik (Renstra) Pemerintah Kota Cirebon yang terdapat pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Cirebon, yang berisi informasi tentang keberhasilan maupun kegagalan pencapaian sasaran yang telah ditetapkan, termasuk hambatan yang dihadapi dan pemecahan masalahnya sesuai dengan Visi dan Misi Dinas.

Sesuai dengan Penetapan Kinerja Tahun Anggaran 2017 dan adanya anggaran perubahan, maka pada Tahun 2017 ini terdapat 6 sasaran dengan 6 indikator sasaran, 13 kebijakan, 15 progam, serta 44 kegiatan yang harus dicapai/dilaksanakan, dengan dukungan anggaran DPA-SKPD Tahun 2017 (termasuk anggaran perubahan) yang tersedia sebesar Rp. 8.867.765.889,00 (Delapan milyar delapan ratus enam puluh tujuh juta tujuh ratus enam puluh lima ribu delapan ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah),-, yang terdiri dari Rp 4.050.628.000,- (tiga milyar delapan ratus sembilan puluh sembilan juta empat sembilan belas ribu rupiah) untuk belanja tidak langsung dan Rp 4.743.919.889.000,- (Empat Milyar Tujuh Ratus Empat Puluh Tiga Juta Sembilan Ratus Sembilan Belas Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Rupiah) untuk belanja langsung.

Dari evaluasi kinerja secara mandiri (Self assesment), dari 7 indikator sasaran yang ditetapkan seluruhnya dikategori berhasil dengan capaian akhir kinerja pencapaian sasaran Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DSPPPA) Kota Cirebon Tahun 2017 sebesar 96,71% atau dengan kualifikasi "Baik". Sedangkan pencapaian anggaran sebesar 95,55%, juga dengan kualifikasi "Baik".

Parameter Evaluasi Kinerja

No.	Aspek	Bobot	Komponen dan Sub Komponen
1.	Perencanaan	35%	a. Rencana Strategis 12,5%, meliputi : Pemenuhan Renstra, Kualitas Renstra dan Impelementasi Renstra b. Perencanaan Kinerja Tahunan 22,5%, meliputi : Pemenuhan Perencanaan Kinerja Tahunan (4,5%), Kualitas Perencanaan Kinerja Tahunan (11,25%) dan Impelementasi Perencanaan Kinerja Tahunan (6,75%);
2.	Pengukuran Kinerja	20%	a. Pemenuhan Pengukuran (4%); b. Kualitas Pengukuran (10%); c. Impelementasi Pengukuran (6%)
3.	Pelaporan Kinerja	15%	a. Pemenuhan Pelaporan (3%); b. Penyajian Informasi Kinerja (8%); c. Pemanfaatan Informasi Kinerja (4%);
4.	Evaluasi Kinerja	10%	a. Pemenuhan evaluasi (2%); b. Kualitas Evaluasi (5%);

			c. Pemanfaatan Hasil Evaluasi (3%);
5.	Capaian Kinerja	20%	a. Kinerja yang Dilaporkan (output) (5%); b. Kinerja yang Dilaporkan (Outcome) (5%); c. Kinerja Tahun Berjalan (Benchmark) (5%) d. Kinerja Lainnya (5%)
Total		100%	

Pencapaian sasaran

Pencapaian kinerja sasaran yang dikaitkan dengan pencapaian Visi dan Misi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Cirebon dapat diuraikan sebagai berikut :

Untuk mencapai visi yang telah ditetapkan, dirumuskan beberapa Misi sebagai berikut:

1. Meningkatkan Kualitas Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS);
2. Meningkatkan kualitas hidup perempuan melalui Pengarustamakan Gender (PUG)
3. Meningkatkan kualitas anak melalui pengarusutamaan hak anak (PUHA);
4. Meningkatkan pemberdayaan aparatur dan masyarakat kelurahan;

Penjelasan misi :

1. MISI I

Mengandung makna bahwa lembaga Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Cirebon berperan aktif dalam peningkatan Sumber Daya Manusia aparatur untuk meningkatkan Pelayanan Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).

2. MISI II

Mengandung makna bahwa lembaga Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Cirebon berperan aktif dalam upaya Meningkatkan kualitas hidup dan peran perempuan dalam berbagai bidang pembangunan serta Meningkatkan kualitas tumbuh kembang dan kelangsungan hidup anak dalam mendukung hak-hak anak.

3. MISI III

Mengandung makna bahwa lembaga Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Cirebon berperan aktif dalam peningkatan Sumber Daya Manusia aparatur Kelurahan meningkatkan kapasitas masyarakat, menggerakkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan, pengembangan ekonomi masyarakat, mempercepat penanggulangan kemiskinan melalui program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Kelurahan, Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan/kelurahan, peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Kelurahan, Pengembangan Ekonomi Masyarakat.

KATA PENGANTAR

Dengan senantiasa bersyukur kehadirat Allah SWT, marilah kita bersama-sama tetap melaksanakan amanah dalam bidang tugas kita masing-masing bagi kepentingan negara, nusa dan bangsa yang kita cintai ini.

Sebagai tindak lanjut dari Peraturan Walikota Cirebon Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Di Lingkungan Pemerintah Kota Cirebon, maka kami berusaha menyajikan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Cirebon Tahun Anggaran 2017. LAKIP Tahun 2017 ini merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Cirebon atas penggunaan Anggaran Tahun 2017 yang berisi informasi tentang keberhasilan maupun kegagalan pencapaian sasaran yang telah ditetapkan, termasuk hambatan yang dihadapi dan pemecahan masalahnya.

Akhirnya kami sampaikan terima kasih dan penghargaan kepada semua pihak yang telah bekerja keras dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ini dan semoga Allah SWT senantiasa memberikan petunjuk serta memberikan kekuatan kepada kita semua dalam melaksanakan pembangunan sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi peningkatan pelayanan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan di lingkungan khususnya Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DSPPPA) Kota Cirebon.

Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota
Cirebon maupun Pemerintah Kota Cirebon pada umumnya.

Cirebon, Desember 2017

KEPALA DINAS SOSIAL,
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK KOTA CIREBON



H. Jamaludin, S.Sos
Pembina Utama Muda
NIP. 19600504 198303 1 013

DAFTAR ISI

	Hal
	-
IKHTISAR	ii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Tugas, Fungsi Dan Struktur Organisasi	1
1.2. Aspek Strategis Organisasi	6
1.2.1. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis	6
1.2.2. Strategi Kebijakan, Program dan Kegiatan	8
1.3. Kondisi Dan Tantangan Pembangunan	12
1.3.1. Kondisi Dan Tantangan Pembangunan	12
1.3.2. Kondisi Dan Tantangan Pembangunan Tahun 2017	13
BAB II PERENCANAAN KINERJA	21
2.1. Perjanjian Kinerja	21
2.2. Program dan Kegiatan	22
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	25
3.1. Capaian Kinerja Organisasi	25
3.1.1. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2017	25
3.1.2. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2016 Dengan Tahun 2017	35
3.1.3. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2017 dengan Target Jangka Menengah (RENSTRA)	37
3.1.4. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Tahun 2017 Dengan Standar Nasional	49
3.1.5. Analisis dan Alternatif Solusi	47
3.1.6. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	49
3.1.7. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan/ Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja	52
3.2. Realisasi Anggaran	57

DAFTAR TABEL

	Hal-
Tabel 1.1. Jumlah Pegawai Berdasarkan Komposisi Jabatan dan Jenis Kelamin Pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Cirebon Per 30 Desember 2017	4
Tabel 2.1. Perjanjian Kinerja Tahun 2017 Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Cirebon	21
Tabel 2.2. Program dan Kegiatan Sasaran Strategis 1	22
Tabel 2.3. Program dan Kegiatan Sasaran Strategis 2	23
Tabel 2.4. Program dan Kegiatan Sasaran Strategis 3	23
Tabel 2.5. Program dan Kegiatan Rutin Dinas	24
Tabel 3.1. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2017	26
Tabel 3.2. Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2016 Dengan Tahun 2017	35
Tabel 3.3. Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2017 Dengan Target Renstra	38
Tabel 3.4. Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2017 Dengan Standar Nasional	40
Tabel 3.5. Capaian Kinerja Bidang Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2017	47
Tabel 3.6. Capaian Kinerja Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran, Sarana Prasarana dan Sumber Daya Aparatur	49
Tabel 3.7. Capaian Kinerja Bidang Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2017	54
Tabel 3.8. Realisasi Anggaran Keseluruhan Tahun 2017	57
Tabel 3.9. Realisasi Anggaran Belanja Langsung Tahun 2017	57

DAFTAR GAMBAR

	Hal-
Gambar 1.1 Struktur Organisasi Dinas Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Cirebon Per 30 Desember 2017	6

BAB I

PENDAHULUAN

Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Cirebon (DSPPPA)) merupakan Organisasi Perangkat Daerah yang terbentuk sebagai konsekuensi diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2016 yang mengatur tentang pengelompokan Dinas-dinas daerah yang serumpun. Secara efektif Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Cirebon diberlakukan pada bulan Januari 2017, dengan menggabungkan unsur-unsur kewenangan Pemerintah Kota Cirebon di bidang sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dan pemberdayaan masyarakat sesuai dengan Peraturan Walikota Cirebon Nomor 52 Tahun 2017 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Cirebon.

Saat ini, Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Cirebon menempati Kantor di Jalan Brigjend Dharsono, Kota Cirebon. Kantor yang ditempati merupakan bangunan eks Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (BPMPPKB) Cirebon yang terletak di Jalan Brigjend Dharsono No. 04 By Pass-Kota Cirebon. Keadaan ini merupakan hambatan bagi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Cirebon dalam pengembangan lahan. Padahal, secara organisasi, Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Cirebon membutuhkan banyak lahan untuk kepentingan pelaksanaan tugas dan fungsinya, diantaranya perlunya pendirian Rumah Perlindungan Sosial Anak (RPSA) dan Lingkungan Pondok Sosial (LIPOSOS), Panti Persinggahan dan Loka Bina Karya.

1.1. Tugas, Fungsi Dan Struktur Organisasi

Sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsinya, Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Cirebon memiliki kewenangan dan urusan tentang bidang sosial, bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta bidang pemberdayaan masyarakat, sehingga dinas ini memiliki kedudukan yang strategis untuk menjawab

permasalahan yang menjadi isu sentral pemerintahan yaitu, kemiskinan, pengangguran, sempitnya lapangan kerja serta konsekuensi terjadinya perubahan dan pembangunan berupa permasalahan kesejahteraan sosial yang menyertainya.

Berdasarkan hal di atas, maka untuk memperlancar tugas dan fungsi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Cirebon perlu didukung oleh personil yang sesuai dengan kompetensinya. Sampai saat ini, UPTD RPSA (Rumah Persinggahan Sosial Anak) belum memiliki seorangpun tenaga fungsional. Hal ini mengakibatkan belum optimalnya pelayanan di UPTD RPSA (Rumah Persinggahan Sosial Anak), dikarenakan masih mengandalkan pekerja sosial (peksos) dari Kementerian Sosial. Selain itu, sampai saat ini juga Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Cirebon belum memiliki bangunan yang dapat digunakan sebagai Rumah Perlindungan Sosial Anak (RPSA), Lingkungan Pondok Sosial (LIPOSOS), Panti Persinggahan dan Loka Bina Karya.

a. Kedudukan

1. Dinas adalah unsur pelaksana otonomi daerah di bidang sosial, bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
2. Dinas dipimpin oleh seorang Kepala Dinas, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

b. Tugas dan Fungsi

1. Tugas Pokok

Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai tugas pokok membantu Wali Kota melaksanakan Urusan Pemerintahan dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah di bidang sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, serta pemberdayaan masyarakat dan kelurahan.

2. Fungsi

Fungsi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Cirebon, yaitu :

1. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang

sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, serta pemberdayaan masyarakat dan kelurahan.

2. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.

A. Struktur Organisasi

Struktur organisasi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Cirebon terdiri dari :

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretariat
 1. Sub Bagian Umum
 2. Sub Bagian Program dan Pelaporan
 3. Sub Bagian Keuangan
- c. Bidang Sosial
 1. Seksi Pemberdayaan dan Rehabilitasi Sosial; dan
 2. Seksi Perlindungan dan Jaminan Sosial
- d. Bidang Pemberdayaan Perempuan, terdiri dari:
 1. Seksi Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan Keluarga;
 2. Seksi Perlindungan Perempuan.
- e. Bidang Perlindungan Anak, terdiri dari:
 1. Seksi Pemenuhan Hak Anak; dan
 2. Seksi Perlindungan Khusus Anak.
- f. Bidang Pemberdayaan Masyarakat, terdiri dari:
 1. Seksi Administrasi Kelurahan; dan
 2. Seksi Pemberdayaan Lembaga Masyarakat
 - a. UPT; dan
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional.

c. Struktur Organisasi

Secara struktural, sesuai Peraturan Walikota Cirebon Nomor 52 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Cirebon, Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Cirebon dipimpin oleh 1 (satu) orang Kepala Dinas setingkat eselon II b. Secara lengkap, jumlah PNS di lingkungan Dinas Sosial,

Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Cirebon adalah sebagai berikut :

Tabel 1.1. Jumlah Pegawai Berdasarkan Komposisi Jabatan dan Jenis Kelamin Pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Cirebon per 30 Desember 2017

No.	Uraian	Jumlah (orang)
1	Pegawai laki-laki	16
2	Pegawai Perempuan	21
	Total	37

Sumber : SIMPEG Kota Cirebon dan Sub Bag Umum, 2017

Dari Tabel 1.1, jumlah PNS di lingkungan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak berjumlah 37 (tiga puluh tujuh) orang. Terdapat beberapa Pejabat Eselon IV yang tidak mempunyai staf/fungsional umum. Hal ini tentu saja dapat berimbas pada tingkat pelayanan terhadap masyarakat, dikarenakan tupoksi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang sangat kental dengan pelayanan langsung ke masyarakat.

Keadaan di atas merupakan hambatan tersendiri di tengah makin maraknya kasus-kasus sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta pemberdayaan masyarakat kelurahan yang membutuhkan penanganan yang semakin cepat dan profesional. Kecepatan dan ketepatan penanganan terhadap kasus-kasus sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak akan berpengaruh terhadap stabilitas sosial dan ekonomi secara khusus di Kota Cirebon dan pada tingkat Nasional secara umum. Selain itu juga berpengaruh dalam rangka percepatan terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan.

Secara Organisasi, Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Cirebon membawahkan :

Struktur organisasi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Cirebon terdiri dari :

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretariat
 1. Sub Bagian Umum
 2. Sub Bagian Program dan Pelaporan
 3. Sub Bagian Keuangan

- c. Bidang Sosial
 - 1. Seksi Pemberdayaan dan Rehabilitasi Sosial; dan
 - 2. Seksi Perlindungan dan Jaminan Sosial
- d. Bidang Pemberdayaan Perempuan, terdiri dari:
 - 1. Seksi Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan Keluarga;
 - 2. Seksi Perlindungan Perempuan.
- e. Bidang Perlindungan Anak, terdiri dari:
 - 1. Seksi Pemenuhan Hak Anak; dan
 - 2. Seksi Perlindungan Khusus Anak.
- f. Bidang Pemberdayaan Masyarakat, terdiri dari:
 - 1. Seksi Administrasi Kelurahan; dan
 - 2. Seksi Pemberdayaan Lembaga Masyarakat
 - a. UPT; dan
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, yang terdiri dari:

- 1. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)
 - a. UPT Lingkungan Pondok Sosial, Panti Persinggahan dan Loka Bina Karya, membawahkan :
 - Sub Bagian Tata Usaha, dan
 - Kelompok Jabatan Fungsional.
 - b. UPT Taman Makam Pahlawan dan Nilai-Nilai Kepahlawanan, membawahkan :
 - Sub Bagian Tata Usaha, dan
 - Kelompok Jabatan Fungsional.
 - c. UPT Rumah Perlindungan Sosial Anak, membawahkan :
 - Sub Bagian Tata Usaha, dan
 - Kelompok Jabatan Fungsional.

1.2. Aspek Strategis Organisasi

1.2.1. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis

A. Visi

Visi Pemerintah Kota Cirebon dalam RPJP 2005 – 2025 adalah sebagai berikut:

“Dengan Nuansa Religius Kota Cirebon Menjadi Kota Perdagangan Dan Jasa Yang Maju Dan Sejahtera”

Pemerintah Kota Cirebon dengan Walikota dan Wakil Walikota Cirebon terpilih tahun 2013-2018 melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Cirebon telah menetapkan visi sebagai berikut :

“Terwujudnya Kota Cirebon Yang Religius, Aman, Maju, Aspiratif dan Hijau Tahun 2018”

Sedangkan Misinya adalah :

1. Mewujudkan aparatur pemerintahan dan masyarakat Kota Cirebon yang religius.
2. Meningkatkan profesionalisme aparatur dan revitalisasi kelembagaan pemerintah kota yang efektif dan efisien menuju tata pemerintahan yang baik, amanah, bersih, dan bebas dari KKN.
3. Meningkatkan kualitas keamanan dan ketertiban umum.
4. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia Kota Cirebon pada sektor ekonomi, pendidikan dan kesehatan yang berbasis pada budaya dan kearifan lokal.
5. Meningkatkan peran serta unsur masyarakat dalam pembangunan.
6. Meningkatkan kualitas keseimbangan dan pelestarian lingkungan hidup.

Dengan mengacu kepada visi Walikota dan Wakil Walikota 2013 - 2018, maka Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Cirebon untuk tahun 2013-2018 menetapkan visi sebagai berikut :

“ TERWUJUDNYA PELAYANAN SOSIAL, PEREMPUAN, ANAK DAN MASYARAKAT YANG MAJU DAN MANDIRI TAHUN 2018 “

B. Misi

Sedangkan Misi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Cirebon tahun 2013 – 2018 adalah sebagai berikut :

Untuk mencapai visi yang telah ditetapkan, dirumuskan beberapa Misi sebagai berikut:

1. Meningkatkan Kualitas Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS);
2. Meningkatkan kualitas hidup perempuan melalui Pengarusutamaan Gender (PUG)
3. Meningkatkan kualitas anak melalui pengarusutamaan hak anak (PUHA);
4. Meningkatkan pemberdayaan aparatur dan masyarakat kelurahan;

C. Tujuan

Tujuan jangka menengah Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Cirebon Tahun 2013 – 2018 dirumuskan sebagai berikut :

1. Menurunnya jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial.
2. Menurunkan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.
3. Meningkatnya komitmen dalam percepatan PUG dan meningkatnya kualitas hidup perempuan dan anak;
4. Meningkatkan pelayanan administrasi perkantoran, meningkatkan sarana dan prasarana aparatur kelurahan;
5. Meningkatkan partisipasi masyarakat (swadaya masyarakat);
6. Meningkatkan tertib administrasi kelurahan;
7. Meningkatkan kemandirian LKK
8. Meningkatkan kemandirian masyarakat kelurahan dalam bidang ekonomi dan sosial budaya;

D. Sasaran Strategis

1. Sasaran pembangunan jangka menengah 2013 – 2018 Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Cirebon Tahun 2013 – 2018 adalah sebagai berikut : Meningkatkan perlindungan dan jaminan sosial

2. Terfasilitasinya pengaduan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, dinas instansi, pemenuhan terhadap hak-hak perempuan dan anak;
3. Terlaksananya daya beli masyarakat dan meningkatnya ekonomi keluarga;
4. Meningkatnya tertib administrasi kelurahan;
5. Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran
6. Meningkatnya partisipasi masyarakat;
7. Meningkatnya kemandirian pengurus LKK;

1.2.2.Strategi Kebijakan, Program dan Kegiatan

A. Strategi dan Kebijakan

Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka strategidan kebijakan yang dikeluarkan dan ditempuh oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Cirebon adalah sebagai berikut :

- 1) **Misi 1**, strategi:
 - a. Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) :
 1. Mengoptimalkan fungsi panti-panti pelayanan sosial.
 - b. Penyediaan sarana dan prasarana penanggulangan bencana, dengan kebijakan : Meningkatkan penyediaan sarana dan prasarana penanggulangan bencana.
 - c. Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran, sarana prasarana dan sumber daya aparatur, dengan kebijakan :
 1. Meningkatkan pelayanan administrasi perkantoran.
 2. Meningkatkan pelayanan sarana dan prasarana aparatur.
 3. Meningkatkan pelayanan sumber daya aparatur.
 4. Meningkatkan kinerja dan sistem pelaporan.
- 2) **Misi 2**, strategi:
 - a. Meningkatkan kualitas hidup perempuan dan anak :
 1. Peningkatan kualitas hidup perempuan dan anak.
- 3) **Misi 3**, strategi:
 - a. Peningkatan keberdayaan masyarakat
 1. Pembinaan dan pemberian modal simulan.
 - b. Pembentukan posyantek dan wartek di Kecamatan.

1. Menetapkan dan membentuk posyantek dan wartek disetiap Kecamatan.
- c. Pemberian makanan tambahan bagi anak sekolah SD/MI, PAUD, BKB Kemas
 1. Menetapkan SD/MI, PAUD, BKB Kemas terpilih
- d. Penguatan kapasitas kelompok UP2K
 1. Menetapkan UP2K terpilih
- e. Peningkatan sarana dan prasarana posyandu
 1. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana posyandu
- f. Peningkatan Kinerja aparatur kelurahan dengan penyelenggaraan pemerintahan kelurahan yang baik
 1. Meningkatkan kualitas dan fasilitasi administrasi aparatur serta peningkatan proporsi pembiayaan pembangunan yang berasal dari musrenbang kecamatan.
- g. Peningkatan swadaya masyarakat melalui BBGRM, Bhakti TNI Satata Sariksa, Penunjang Bantuan RW.
 1. Melaksanakan sosialisasi, pembinaan dan pencahangan BBGRM, Bhakti TNI, Penunjang Bantuan RW, serta melaksanakan gerakan kesadaran masyarakat terhadap lingkungan.
- h. Peningkatan kemandirian LKK melalui vitalisasi kinerja LKK
 1. Melaksanakan sosialisasi pembinaan dan lomba LKK terbaik.
 - i. Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran, sarana prasarana dan sumber daya aparatur.
 1. Meningkatkan pelayanan administrasi perkantoran
 2. Meningkatkan pelayanan sumber daya aparatur
 3. Meningkatkan pelayanan sarana dan prasarana aparatur
 4. Meningkatkan disiplin aparatur
 5. Meningkatkan kinerja dan sistem pelaporan

B. Program

Untuk mewujudkan visi dan misi dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai seperti tersebut di atas, maka Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Cirebon merencanakan program sebagai berikut :

1) **Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**

Program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas administrasi perkantoran yang mampu mendukung pelaksanaan tugas-tugas teknis dan pelayanan masyarakat maupun pelayanan internal antar bagian Dinas dan lintas sektoral.

2) **Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**

Program ini bertujuan untuk meningkatkan keberfungsian sarana prasarana serta kualitas aparatur Dinas yang mampu mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas sesuai dengan rencana strategis.

3) **Program Peningkatan Disiplin Aparatur**

Program ini berisikan kegiatan tentang Pengadaan Pakain Dinas/Lapangan Beserta Kelengkapannya.

4) **Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**

Program ini ditujukan pada peningkatan kualitas pengendalian seluruh program dan pelaksanaan kegiatan agar tepat sasaran, efisien dan efektif dari sisi keuangan, fisik maupun jadwal waktu.

5) **Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial**

Program ini bertujuan untuk mengembangkan kesadaran, kemampuan, tanggung jawab dan peran aktif masyarakat dalam menangani permasalahan sosial di lingkungannya dan memperbaiki kualitas hidup serta kesejahteraan penyandang masalah kesejahteraan sosial yang mencakup antara lain (1) Pelayanan dan perlindungan sosial, hukum bagi korban eksploitasi, perdagangan perempuan dan anak, (2) Peningkatan kualitas pelayanan, sarana, dan prasarana rehabilitasi kesejahteraan sosial bagi PMKS; (3) penunjang Program Keluarga Harapan; (4) Jaminan sosial bagi anak terlantar dan PMKS terlantar, khususnya lanjut usia; (5) Pengembangan dan Pemberdayaan Kesejahteraan Sosial.

6) **Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak**

Program Penguatan kelembagaan pengarusutamaan Gender dan anak. Program ini bertujuan untuk memberikan fasilitas terhadap kelancaran pengarusutamaan gender dan anak.

Tujuan program ini adalah untuk memperkuat kelembagaan dan jaringan pengarusutamaan gender (PUG) dan pengarusutamaan hak anak (PUHA) diberbagai bidang pembangunan, di tingkat nasional dan daerah.

7) **Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Kelurahan**

Program ini bertujuan untuk pertama, pengembangan masyarakat, dan yang kedua pengorganisasian masyarakat. apa yang dikembangkan dari masyarakat yaitu potensi atau kemampuannya dan sikap hidupnya. kemampuan masyarakat dapat meliputi antara lain kemampuan untuk bertani, berternak, melakukan wirausaha, atau ketrampilan-ketrampilan membuat home industri; dan masih banyak lagi kemampuan dan ketrampilan masyarakat yang dapat dikembangkan.

8) **Program Penguatan Jejaring Kemitraan Dalam Rangka Penanganan PMKS**

Program ini bertujuan untuk memelihara dan meningkatkan keharmonisan hubungan industrial antara pekerja, pengusaha dan peran serta pemerintah sehingga dapat mewujudkan kesejahteraan pekerja dan ketenangan berusaha.

9) **Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Kelurahan**

Program ini bertujuan untuk memelihara dan meningkatkan pengetahuan masyarakat mengenai informasi pelaksanaan partisipasi masyarakat dalam membangun kelurahan.

10) **Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan**

Program Peningkatan Peran Serta serta Kesetaraan Gender dalam pembangunan.

Program ini bertujuan untuk mewujudkan peran perempuan yang lebih optimal dalam pembangunan.

Tujuan program ini adalah untuk mewujudkan keserasian kebijakan diberbagai bidang pembangunan dalam rangka peningkatan kualitas anak dan perempuan, di tingkat nasional dan daerah.

11) **Program Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**

Capaian pembangunan perlindungan perempuan meliputi:

1) Berbagai pengaturan teknis terkait perlindungan perempuan

2) Dibentuk dan difungsikannya lembaga-lembaga pelayanan korban kekerasan.

Kebijakan pemenuhan hak dan perlindungan anak difokuskan pada tiga hal, yaitu: pencegahan, pelayanan dan penanganan masalah yang dihadapi anak.

pemenuhan hak dan perlindungan anak difokuskan pada tiga hal, yaitu: pencegahan, pelayanan dan penanganan masalah yang dihadapi anak.

Prinsip yang harus selalu diterapkan dalam pemenuhan hak dan perlindungan anak.

12) **Program Penanggulangan Korban Bencana**

Program ini bertujuan.

1. Mewujudkan Profesionalitas Aparatur dalam menghadapi Bencana.
2. Mewujudkan Ketersediaan Sarana dan Prasarana Kebencanaan.
3. Mewujudkan Ketanggapan Masyarakat dan Budaya Sadar Bencana.
4. Mewujudnya Koordinasi Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana secara terpadu, terkoordinasi dan menyeluruh.

13) **Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Kelurahan/Kecamatan**

Program ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas aparatur pemerintahan Kelurahan/Kecamatan yang sesuai dengan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Aparatur Pelayanan Publik dalam Kerangka Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

14) **Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan**

Program ini bertujuan untuk Pengembangan

kapasitas kelembagaan sering digunakan secara sederhana untuk menjadikan suatu lembaga lebih efektif mengimplementasikan proyek pembangunan.

Kelembagaan merupakan instrumen untuk mencapai tujuan tertentu. Pengembangan kapasitas kelembagaan dapat juga menunjuk pada upaya yang mendukung organisasi kecamatan/kelurahan untuk memberikan kontribusi dalam mencapai alternatif pembangunan.

15) **Program Satu Data Keluarga Miskin**

Program ini bertujuan untuk perencanaan dan pengendalian pembangunan, serta sebagai upaya dalam mendukung program “Satu

Data Pembangunan Jawa Barat” sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 24 Tahun 2012 tentang Satu Data Pembangunan Jawa Barat dan Mengurangi jumlah Kekerasan terhadap ibu dan anak serta Meningkatkan Kinerja Masyarakat Kelurahan.

C. Kegiatan

a. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

b. Penyusunan dan Publikasi Profil SKPD

Penyusunan Pelaporan Keuangan SKPD Untuk menentukan keberhasilan program-program di atas, maka program-program tersebut diturunkan menjadi kegiatan-kegiatan yang relevan yang dilaksanakan oleh unit-unit teknis terkait, yang dirinci sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Program ini terdiri dari 13 kegiatan, yaitu :

- a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat, Alat Tulis Kantor, Barang Cetak dan Penggandaan
- b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, Listrik dan Logistik.
- c. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional dan Jaminan Barang Milik Daerah.
- d. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
- e. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
- f. Penyediaan Makanan dan Minuman
- g. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
- h. Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Program ini terdiri dari 4 kegiatan, yaitu :

- a. Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional/Jabatan
- b. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
- c. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional/Jabatan
- d. Pengadaan Perlengkapan/Peralatan Gedung Kantor

3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

- a. Pengadaan Pakaina Dinas/Lapangan Beserta Perlengkapannya

4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Program ini terdiri dari 6 kegiatan, yaitu :

- a. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
- b. Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD
- c. Penyusunan RKA/DPA SKPD dan Perubahannya
- d. Penyusunan Pedoman Kinerja SKPD
- e. Penyusunan dan Publikasi Profil SKPD
- f. Penyusunan Pelaporan Keuangan

5. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial

Program ini terdiri dari 5 kegiatan, yaitu :

- a. Pelayanan dan perlindungan sosial, hukum bagi korban eksploitasi, perdagangan perempuan dan anak
- b. Peningkatan kualitas pelayanan, sarana, dan prasarana rehabilitasi kesejahteraan sosial bagi PMKS
- c. Program Keluarga Harapan
- d. Jaminan sosial bagi PMKS
- e. Pengembangan dan Pemberdayaan Kesejahteraan Sosial

6. Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak

Program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup perempuan dan anak melalui pengarusutamaan gender dan anak, terdiri atas kegiatan:

- a. Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak

7. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Kelurahan

Program ini bertujuan meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan, yang bertujuan untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan, sasaran yang ingin dicapai adalah meningkatnya

Meningkatkan pemberdayaan masyarakat menuju RW RAMAH melalui RW Bersih dan Sehat, RW Pintar, RW

Zero Waste dan RW terdiri dari kegiatan:

- a. Pemasarakatan dan Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna
- b. Pembinaan Posyandu Tingkat Kota

8. Program Penguatan Jejaring Kemitraan Dalam Rangka Penanganan PMKS

Program ini bertujuan untuk menguatkan Jejaring Kemitraan dalam rangka Penanganan PMKS; dan meningkatkan rehabilitasi dan perlindungan sosial bagi PMKS, terdiri dari kegiatan:

- a. Peningkatan Jejaring Kerjasama Pelaku-Pelaku Usaha Kesejahteraan Sosial Masyarakat
- b. Peningkatan Pelestarian Nilai-Nilai Kepahlawanan dan Kesetiakawanan Sosial.

9. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Kelurahan

Program ini bertujuan meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan, yang bertujuan untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan, sasaran yang ingin dicapai adalah meningkatnya proporsi pembiayaan pembangunan yang berasal dari musrenbang kecamatan serta meningkatnya nilai swadaya masyarakat dalam stimulan/bantuan RW, terdiri atas kegiatan:

- a. Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Bantuan RW
- b. Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat
- c. Bhakti TNI Pola Manunggal Satata Sariksa
- d. Peningkatan Peran Serta Masyarakat Melalui Bhakti Siliwangi Manunggal Satata Sariksa (BSMSS) (Dana Propinsi)

10. Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan

Program ini bertujuan untuk meningkatkan perlindungan terhadap perempuan dan anak, meningkatkan kualitas penanganan masalah kesejahteraan sosial dan meningkatkan pengarusutamaan gender untuk mencapai sasaran yang akan dicapai yaitu menurunnya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, dengan kegiatan:

- a. Pengembangan dan Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender

11. Program Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Program ini bertujuan untuk mengoptimalkan peran Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) melalui perluasan jejaring pelayanan dan menurunkan kasus kekerasan terhadap perempuan

dan anak melalui melalui penguatan fungsi keluarga dan optimalisasi Pusat pelayanan terpadu (RSUD Gunung Jati), dengan kegiatan:

- a. Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2TP2A)
- b. Pembentukan Kawasan Percontohan RW Layak Anak Tingkat Kelurahan
- c. Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat Sejahtera (P2WKSS)

12. Program Penanggulangan Korban Bencana

Program ini bertujuan untuk meningkatnya daya tanggap terhadap bencana bencana, dengan kegiatan:

- a. Penanggulangan Masalah-Masalah Strategi Yang Menyangkut Tanggap Cepat Darurat dan Kejadian Luar Biasa

13. Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Kelurahan/Kecamatan

Paket dukungan teknis ini bertujuan memperkuat peranan para pemangku kepentingan di kecamatan melalui pelatihan aparat kecamatan, pendampingdesa dan unit layanan untuk mengelola mengkoordinasi, danmemfasilitasi pelayanan dasar sesuai dengan Undang-undang

No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang No. 6 tahun 2014 tentang Desa, dengan kegiatan:

- a.Lomba Kelurahan Tingkat Kota
- b.Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Administrasi Kelurahan

14. Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan

Program ini bertujuan untuk kegiatan yang dilaksanakan meliputi :

1. Pembinaan Sumber Daya Aparatur Perangkat Daerah
2. Konsultasi Kelembagaan Perangkat Daerah

Terdiri atas kegiatan:

- a.Lokakarya dan Vitalisasi Kinerja LKK
- b.Pembinaan LKK

15. Program Satu Data Keluarga Miskin

Program ini bertujuan sebagai Basis Data Terpadu dalam Program Perlindungan Sosial yang dikelola oleh Tim Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk Percepatan Penanggulangan Kemiskinan adalah sebuah sistem yang dapat digunakan untuk perencanaan program dan mengidentifikasi nama & alamat calon penerima bantuan sosial, baik rumah tangga, keluarga maupun individu berdasarkan pada kriteria-kriteria sosial-ekonomi yang ditetapkan oleh pelaksana Program, dengan kegiatan:

a. Penyusunan Data PMKS dan PSKS

1.3. Kondisi Dan Tantangan Pembangunan

1.3.1. Kondisi dan Tantangan Pembangunan

Kondisi dan tantangan pembangunan yang dihadapi oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Cirebon terkait dengan bidang sosial, bidang pemberdayaan perempuan, bidang perlindungan anak dan bidang pemberdayaan masyarakat secara umum yang ada di Kota Cirebon berbeda dengan tahun sebelumnya.

Letak Kota yang berada pada jalur utama lintas Pantura menyebabkan pertumbuhan ekonomi Kota Cirebon mengalami kemajuan yang pesat. Apalagi dengan dibangunnya jalan Tol Cikopo-Palimanan (Cipali). Hal ini juga ditandai dengan menjamurnya usaha-usaha baru, khususnya perdagangan dan jasa, selama lima tahun terakhir. Dampak dari menjamurnya usaha-usaha baru, selain dapat meningkatkan jumlah pendapatan masyarakat serta pemerintah setempat, juga menimbulkan dan menambah masalah-masalah baru, khususnya masalah sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Masalah-masalah sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang menjadi tantangan pembangunan Pemerintah Kota Cirebon, khususnya Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, antara lain :

- 1) Dampak negatif nilai-nilai sosial yang seolah menjustifikasi bahwa kemiskinan, kefakiran dan keterlantaran adalah hal yang niscaya dan terpelihara sehingga ketergantungan sosial, ekonomi dan budaya masyarakat yang kurang beruntung menjadi tinggi;
- 2) Dampak negatif dari globalisasi, akibat kemudahan transportasi, komunikasi dan penyebarluasan berbagai informasi akan berpengaruh

terhadap pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak bagimasyarakat Kota Cirebon;

- 3) Pertumbuhan ekonomi kawasan Kota Cirebon menyebabkan tingginya kompleksitas masyarakat tentang KDRT (Korban Tindak Kekerasan dalam Rumah Tangga) dan Perlindungan Anak di Kota Cirebon;
- 4) Peningkatan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di Kota Cirebon sampai saat ini masih cukup kompleks, khususnya menyangkut tingkat kemiskinan, Anak Jalanan, Anak Terlantar, Gepeng dan tindak kekerasan.
- 5) Kurang optimalnya Pemberdayaan Lembaga Masyarakat dan Administrasi Kelurahan di Kota Cirebon

1.3.2. Kondisi dan Tantangan Pembangunan Tahun 2017

Kondisi dan tantangan pembangunan Tahun 2017 tidak jauh berbeda dengan kondisi dan tantangan pembangunan seperti yang tercantum dalam Rencana Strategis seperti tersebut di atas. Dari sejumlah 5 (lima) permasalahan yang ada, tantangan pembangunan yang paling menonjol dalam bidang sosial, bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Kota Cirebon selama Tahun 2017 adalah :

1. Belum tersedianya sarana dan prasarana pelayanan kesejahteraan sosial, baik pembangunan Rumah Perlindungan Sosial Anak (RPSA), pembenahan Lingkungan Pondok Sosial (Liposos), Panti Persinggahan dan Loka Bina Karya maupun melalui lembaga kesejahteraan sosial (LKS) yang ada di masyarakat;
2. Menurunnya partisipasi masyarakat;
3. Menurunnya kemampuan usaha keluarga miskin;
4. Jumlah Penduduk yang terus bertambah berakibat meningkatnya masalah ekonomi masyarakat;
5. Terdapatnya ketidakadilan dan ketidaksetaraan gender;
6. Terbatasnya SDM DSPPPA (Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak) Kota Cirebon;
7. Kesenjangan sosial yang semakin melebar antara kaya dan miskin

Kondisi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DSPPPA) dalam melaksanakan tantangan pembangunan yang ada pada Tahun 2017 adalah sebagai berikut :

- 1) Adanya alokasi anggaran pembangunan kesejahteraan sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anakserta bidang

pemberdayaan masyarakat di Kota Cirebon yang bersumber dari APBD Kota, APBD Propinsi, dan APBN;

- 2) Adanya Standar Pelayanan Minimal (SPM) di bidang Sosial, Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta bidang pemberdayaan masyarakat;
- 3) Kurangnya tenaga profesional yang berkualitas dan kredibel;
- 4) Belum optimalnya Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta bidang pemberdayaan masyarakat sehingga masih sulit memperoleh data yang akurat dan aktual (tepat waktu);
- 5) Belum optimalnya kegiatan pada masing-masing bidang, hal ini antara lain kurang kesadaran dari pihak.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1. Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja yang telah ditetapkan oleh Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Cirebon Tahun Anggaran 2017 adalah sebagai berikut :

**Tabel 2.1. Perjanjian Kinerja Tahun 2017
Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Cirebon**

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET
1	2	3	4
1.	Menurunnya jumlah PMKS	PMKS yang memperoleh bantuan sosial untuk memenuhi kebutuhan dasar, Jumlah MOU kemitraan dalam penanganan PMKS, Tersediaanya data base yang Valid	1% (737)
2.	Terfasilitasinya pengaduan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	Meningkatnya keterwakilan gender 30% dalam pembangunan, Rasio RW layak anak per kelurahan, Penanganan pengaduan	3%, 2RW/22 kel/100 KK Binaan, 56 Kasus
3.	Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Kelurahan	Berkembangnya lembaga ekonomi kelurahan	2 wartek, 1 paket pameran TTG, 1 strata posyandu mandiri
4.	Meningkatnya tertib administrasi kelurahan	Meningkatnya pengetahuan dan kemampuan pelayanan aparatur pemerintahan kecamatan dan kelurahan	4 kelurahan
5.	Meningkatnya nilai swadaya masyarakat dalam stimulan/bantuan RW	Prosentase swadaya 10% terhadap jumlah bantuan RW	10%
6.	Meningkatnya kemandirian pengurus LKK	Rasio jumlah pengurus LKK yang dibina	30%

Sumber : Penetapan Kinerja Tahun Anggaran 2017

2.2. Program dan Kegiatan

Untuk mencapai target di atas, maka pada Tahun 2017 Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menetapkan program dan kegiatan sebagai berikut :

1. **Sasaran Strategis 1**, yaitu tercapainya penurunan jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)

Untuk mencapai sasaran 1 ini, pada Tahun 2017 Dinas telah menyusun 4 (empat) Program dan 9 (sembilan) kegiatan, yaitu sebagai berikut :

Tabel 2.2. Program dan Kegiatan Sasaran Strategis 1

Nama Program dan Kegiatan	Jumlah Anggaran (Rp)
Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	659.000.000
1. Pelayanan dan Perlindungan Sosial, Hukum Bagi Korban Eksploitasi, Perdagangan Perempuan dan anak	50.000.000
2. Peningkatan kualitas pelayanan, sarana dan prasarana rehabilitasi kesejahteraan sosial bagi PMKS	53.000.000
3. Program Keluarga Harapan	450.000.000
4. Jaminan Sosial Bagi Lansia Terlantar dan PMKS Terlantar	53.000.000
5. Pengembangan dan Pemberdayaan Kesejahteraan Sosial	534.000.000
Program Penguatan Jejaring Kemitraan Dalam Rangka Penanganan PMKS	
1. Peningkatan Jejaring Kerjasama Pelaku-Pelaku Usaha Kesejahteraan Sosial Masyarakat	70.000.000,00
2. Peningkatan Pelestarian Nilai-Nilai Kepahlawanan dan Kesetiakawanan Sosial	51.000.000,00
Program Penanggulangan Korban Bencana	
1. Penanggula Masalah-Masalah Strategi Yang Menyangkut Tanggap Cepat Darurat dan Kejadian Luar Biasa	34.668.500,00
Program Satu Data Keluarga Miskin	
2. Penyusunan Data PMKS dan PSKS	70.000.000,00

2. **Sasaran Strategis 2**, yaitu Terfasilitasinya pengaduan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak

Untuk mencapai sasaran 1 ini, pada Tahun 2017 Dinas telah menyusun 3 (tiga) Program dan 5 (lima) kegiatan, yaitu sebagai berikut :

Tabel 2.3. Program dan Kegiatan Sasaran Strategis 2

Nama Program dan Kegiatan	Jumlah Anggaran (Rp)
Program Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	470.000.000,00
1. Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2TP2A)	193.811.000,00
2. Pembentukan Kawasan Percontohan RW Layak Anak Tingkat Kelurahan	126.189.000,00
3. Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat Sejahtera (P2WKSS)	150.000.000,00
Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan	98.590.000,00
3. Pengembangan dan Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender	98.590.000,00
Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	201.410.000,00
1. Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	201.410.000,00

3. **Sasaran Strategis 3**, yaitu Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Kelurahan, Meningkatnya tertib administrasi kelurahan, Meningkatnya swadaya masyarakat, Meningkatnya kemandirian pengurus LKK.

Untuk mencapai sasaran 1 ini, pada Tahun 2017 Dinas telah menyusun 4 (empat) Program dan 10 (sepuluh) kegiatan, yaitu sebagai berikut :

Tabel 2.4. Program dan Kegiatan Sasaran Strategis 3

Nama Program dan Kegiatan	Jumlah Anggaran (Rp)
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Kelurahan	301.566.100,00
1. Pemasyarakatan dan Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	95.476.000,00
2. Pembinaan Posyandu Tingkat Kota	206.090.100,00
Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Kelurahan	496.405.000,00
1. Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Bantuan RW	79.655.000,00
2. Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	150.000.000,00
3. Bhakti TNI Pola Manunggal Satata Sariksa	166.750.000,00
4. Peningkatan Peran Serta Masyarakat Melalui Bhakti Siliwangi manunggal Satata Sariksa (BSMSS) (Dana Propinsi)	100.000.000,00
Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Kelurahan/Kecamatan	287.472.000,00
1. Lomba Kelurahan Tingkat Kota	73.672.000,00
2. Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Administrasi Kelurahan	213.800.000
Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan	511.555.000,00
1. Lokakarya dan Vitalisasi Kinerja LKK	81.555.000
2. Pembinaan LKK	430.000.000,00

Selain program dan kegiatan yang berhubungan langsung dengan sasaran strategis yang telah ditetapkan, dalam penetapan kinerja juga telah ditetapkan program dan kegiatan yang berkaitan dengan kegiatan rutin Dinas, yaitu sebagai berikut :

Tabel 2.4. Program dan Kegiatan Rutin Dinas

Nama Program dan Kegiatan	Jumlah Anggaran (Rp)
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	808.693.289,00
1). Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	156.145.500,00
2). Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	25.200.000,00
3). Penyediaan Makanan dan Minuman	43.784.500,00
4). Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	307.375.000,00
5). Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor	58.162.500,00
6). Penyediaan Jasa Surat Menyurat, Alat Tulis Kantor, Barang Cetak dan Penggandaan	88.098.100,00
7). Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, Listrik dan Logistik	91.965.189,00
8). Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional dan Jaminan Barang Milik Daerah	37.962.500,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	33.007.400,00
9). Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	28.380.600,00
10). Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional/Jabatan	64.849.000,00
11). Pengadaan Perlengkapan/Peralatan Gedung Kantor	135.137.400,00
12). Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional/Jabatan	130.770.000,00
13). Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan/Peralatan Gedung Kantor	23.000.000,00
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	66.025.000,00
Pengadaan Pakaian Dinas/Lapangan Beserta Perlengkapannya	66.025.000,00
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	235.398.000,00
14). Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	52.724.000,00
15). Penyusunan RKA/DPA SKPD dan Perubahannya	50.880.000,00
16). Penyusunan dan Publikasi Profil SKPD	48.157.000,00
17). Penyusunan Pelaporan Keuangan SKPD	43.375.000,00
18). Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD	33.255.000,00
19). Penyusunan Pedoman Kinerja SKPD	7.007.000,00

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja yang dilaporkan dilakukan untuk mengevaluasi kinerja dan analisis anggaran yang telah ditetapkan, baik di RENSTRA maupun pada kegiatan, termasuk kegiatan yang dianggarkan pada anggaran perubahan dan capaian terhadap target indikator sasaran strategis yang telah ditetapkan pada Tahun 2017.

3.1. Capaian Kinerja Organisasi

Penjabaran capaian kinerja organisasi yang dilakukan merupakan realisasi capaian pada Tahun 2017 dibandingkan dengan target seperti yang telah ditetapkan pada Penetapan Kinerja Tahun Anggaran 2017. Selain itu, dibandingkan pula dengan pencapaian tahun sebelumnya, dengan target pada RENSTRA dan standar nasional serta analisa tentang efisiensi penggunaan sumber daya dan faktor penyebab kenaikan atau penurunan kinerja.

Perubahan visi dan misi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dari tahun sebelumnya disebabkan karena adanya perubahan kelembagaan sesuai dengan Peraturan Daerah No. 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat daerah Kota Cirebon.

Hal ini tentu saja berpengaruh terhadap perubahan sasaran strategis dan indikator dari sasaran strategis Dinas dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Akan tetapi, capaian antara Tahun 2017 dengan Tahun 2016 dapat diperbandingkan dengan menggunakan indikator yang sama dikarenakan terdapat data yang menunjang.

3.1.1. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2017

Perbandingan antara target yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja dengan realisasi yang dicapai pada Tahun 2017 oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Cirebon adalah sebagai berikut :

Tabel 3.1. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2017

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2017		KETERANGAN
		Target	Realisasi	
1. Tercapainya penurunan jumlah Penyanggah Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Menurunnya jumlah PMKS 5% pada Tahun 2018	1%	Naik 0,744%	Tahun 2016 = 109.250 orang; Tahun 2017 = 108.437 orang Kenaikan/penurunan jumlah PMKS = $(108.437-109.250) / 109.250 = 0,744\%$ Menurunnya jumlah KK miskin berdasarkan data PBI, RASTRA dan PKH pada tahun 2009 s/d 2014 sebesar 66,248 orang sedangkan pada tahun 2015 s/d 2017 berdasarkan hasil pemutakhiran basis data terpadu (PBDT) 2015 dengan jumlah 27.881 orang.
2. Terasilinasinya pengaduan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	Meningkatnya keterwakilan gender 30% dalam pembangunan, Rasio RW layak anak per kelurahan, Penanganan pengaduan	3%, 2RW/22 kel/100 KK Binaan, 60 Kasus	3%, 5RW/22 kel/100 KK Binaan, 53 Kasus	1) Terasilinasinya pengaduan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak dengan indikator kinerja Meningkatnya keterwakilan gender 30% dalam pembangunan, Rasio RW layak anak per kelurahan, Penanganan pengaduan dengan target 3%, 2RW/22 kel/100 KK Binaan, 60 Kasus terealisasi 3%, 5 RW/22 kel/100KK binaan, 53 kasus, artinya dengan realisasi : Terpenuhinya implementasi keterwakilan gender pada kegiatan pembangunan sebesar 30% dengan target terpenuhinya keterwakilan perempuan disektor publik, yaitu: 1. Perempuan menduduki jabatan strategis/pengambil keputusan, untuk eksekutif sebesar 43%. 2. Perempuan di parlemen sebesar 26%. 3. Perempuan di sektor yudikatif sebesar 4%. Peningkatan peran perempuan dalam pembangunan pada kelurahan lokasi P2WKSS sebanyak 100KK binaan dan 20 kader perempuan sebagai motor penggerak pembangunan. Terbentuknya RW layak anak targetnya 2 RW realisasinya mencapai 5 RW yaitu di RW 10 Kel. Kesenden, RW 13 Kel. Pegambiran, RW 10 Kel. Pekirangan, RW 03 Kel. Pekalipan dan RW 06 Kel. Harjamukti sehingga

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) - 2017

				<p>prosentasenya mencapai 250%. 5RW/22 kel/100 KK Binaan, Tertanganinya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak sebanyak 53 kasus, yang terdiri dari 17 orang kekerasan perempuan dan 36 kasus kekerasan pada anak. Kondisi ini lebih kecil dari target yang ditetapkan yaitu sebanyak 60 kasus. Sehingga perhitungan realisasinya menggunakan rumus “indikator bermakna negative” dan didapatkan hasil realisasinya sebesar 71,67%.</p>
3. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Kelurahan	Berkembangnya lembaga ekonomi kelurahan	2 wartek, 1 paket pameran TTG, 1 strata posyandu mandiri	2 wartek, 1 paket pameran TTG, 1 strata posyandu mandiri	<p>Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Kelurahan dengan indikator kinerja Berkembangnya lembaga ekonomi kelurahan.</p> <p>Target 2 wartek, 1 paket pameran TTG, 1 strata posyandu mandiri dengan realisasi 2 wartek, 1 paket pameran TTG, 1 strata posyandu mandiri artinya Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Kelurahan, berkembangnya lembaga ekonomi kelurahan terdiri atas 1 wartek di tahun 2017 dengan target 1 wartek teralisasi 1 wartek yaitu kelurahan Jagasatru.</p>
4. Meningkatnya tertib administrasi kelurahan	Meningkatnya pengetahuan dan kemampuan pelayanan aparatur pemerintahan kecamatan dan kelurahan	4 kelurahan	4 kelurahan	<p>Meningkatnya tertib administrasi kelurahan dengan indikator kinerja Meningkatnya pengetahuan dan kemampuan pelayanan aparatur pemerintahan kecamatan dan kelurahan dengan target 4 kelurahan dengan realisasi 4 kelurahan artinya</p> <p>Meningkatnya tertib administrasi kelurahan, untuk meningkatnya pengetahuan dan kemampuan pelayanan aparatur pemerintahan kecamatan dan kelurahan target 4 kelurahan realisasi 4 Kelurahan sebesar 100% di Tahun 2017 meliputi Kel. Pekiringan, Kel. Panjunan, Kel.Pulasaren dan Kel.Kejaksan, dan Tahun 2016 sebesar 100%.</p>

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) - 2017

5. Meningkatnya swadaya masyarakat	Meningkatnya nilai partisipasi masyarakat/nilai bantuan RW	10%	10%	<p>Target Kinerja untuk tahun 2017 yaitu meningkatnya partisipasi masyarakat dalam bantuan RW dengan target 10 % dari nilai bantuan RW sebesar Rp. 20.000.000/RW sebanyak 248 RW. Nilai partisipasi masyarakat yang terhimpun dari 248 RW pada Tahun 2017 yaitu rata-rata Rp. 2.000.000/RW dengan total swadaya masyarakat se-Kota Cirebon sebesar Rp. 495.000.000.</p> <p>Rumus Indikator Kinerja :</p> <p>Nilai rata-rata stimulan/partisipasi masyarakat dalam bantuan RW(Rp) Jumlah/nilai bantuan RW pada tahun tersebut (Rp)</p> <p>Capaian Indikator Kinerja stimulan/partisipasi masyarakat dalam bantuan RW pada tahun 2017 yaitu Rp. 2.000.000/ Rp. 20.000.000 X 100 = 10 %.</p>
6. Meningkatnya kemandirian pengurus LKK	Rasio jumlah pengurus LKK yang dibina	30%	30%	<p>Jumlah seluruh LKK di Kota Cirebon yaitu 1689 LKK dengan rincian : 248 RW, 1369 RT, 22 LPM, 22 Karang Taruna, 1 TP.PKK Kota, 5 TP.PKK Kecamatan dan 22 TP.PKK Kelurahan.</p> <p>Indikator Kinerja dari meningkatnya kemandirian pengurus LKK yaitu Rasio Jumlah LKK yang dibina dibagi jumlah seluruh LKK dengan Rumus ;</p> <p>$\frac{\text{Jumlah LKK yang dibina}}{\text{Jumlah seluruh LKK}} \times 100\%$</p> <p>Capaian target kinerja tahun 2017 yaitu jumlah LKK yang dibina pada tahun 2017 adalah sejumlah 1672 dari 1689 LKK yang berada di Kota Cirebon (yang tidak dibina yaitu 17 Karang Taruna yang tidak aktif) sehingga capaian tahun 2017 yaitu sebesar 98,9% sudah melebihi target pada tahun 2017 yaitu 30% LKK yang dibina.</p>

Sumber : Bidang Sosial, Bidang PP, Bidang PA, dan Bidang PM, UPTD RPSA, LIPOSOS, Panti Persinggahan dan Loka Bina Karya; Data diolah

Sasaran Strategis 1

Tercapainya penurunan jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dengan Indikator Kinerja Menurunnya jumlah PMKS 5% pada Tahun 2018 dengan target 1% realisasi naik sebesar 0,744% yaitu: Tahun 2016 = 109.250 orang; Tahun 2017 = 108.437 orang

Kenaikan/penurunan jumlah PMKS = $(108.437-109.250)/109.250 = 0,744\%$

Rumus yang digunakan :

$$\text{Jumlah Penurunan PMKS} = \frac{\sum \text{PMKS Thn ke-n} - \sum \text{PMKS Thn ke} - (n - 1)}{\sum \text{PMKS Thn ke} - (n - 1)}$$

Menurunnya jumlah KK miskin berdasarkan data PBI, RASTRA dan PKH pada tahun 2009 s/d 2014 sebesar 66,248 orang sedangkan pada tahun 2015 s/d 2017 berdasarkan hasil pemutakhiran basis data terpadu (PBDT) 2015 dengan jumlah 27.881 orang.

Sasaran Strategis 2

2) Terfasilitasinya pengaduan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak dengan indikator kinerja Meningkatnya keterwakilan gender 30% dalam pembangunan, Rasio RW layak anak per kelurahan, Penanganan pengaduan dengan target 3%, 2RW/22 kel/100 KK Binaan, 60 Kasus terealisasi 30%, 5 RW/22 kel/100KK binaan, 53 kasus, artinya dengan realisasi :

Terpenuhinya implementasi keterwakilan gender pada kegiatan pembangunan sebesar 30% dengan target terpenuhinya keterwakilan perempuan disektor publik, yaitu:

1. Perempuan menduduki jabatan strategis/pengambil keputusan, untuk eksekutif sebesar 43%.
2. Perempuan di parlemen sebesar 26%.
3. Perempuan di sektor yudikatif sebesar 4%.

Peningkatan peran perempuan dalam pembangunan pada kelurahan lokasi P2WKSS sebanyak 100KK binaan dan 20 kader perempuan sebagai motor penggerak pembangunan.

Terbentuknya RW layak anak targetnya 2 RW realisasinya mencapai 5 RW yaitu di RW 10 Kel. Kesenden, RW 13 Kel.Pegambiran, RW 10 Kel. Pekiringan, RW 03 Kel. Pekalipan dan RW 06 Kel. Harjamukti sehingga prosentasenya mencapai 250%.

5RW/22 kel/100 KK Binaan, Tertanganinya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak sebanyak 53 kasus, yang terdiri dari 17 orang kekerasn perempuan dan 36 kasus kekerasan pada anak. Kondisi ini lebih kecil dari target yang ditetapkan yaitu sebanyak 60 kasus. Sehingga perhitungan realisasinya menggunakan rumus “indikator bermakna negative” dan didapatkan hasil realisasinya sebesar 71,67%.

Rumus yang digunakan :

Jumlah Tertanganinya Kasus Kekerasan (Rumus Indikator bermakna Negatif)= $60 - (53 - 60) / 60 \times 100\% = 71,67\%$.

Sasaran Strategis 3

- (3) Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Kelurahan dengan indikator kinerja Berkembangnya lembaga ekonomi kelurahan.

Program pemberdayaan Masyarakat dan program pembangunan daerah merupakan program prioritas Pemerintah yang sangat penting. Hal ini akan tampak ketika segala sesuatu yang memerlukan peran serta pemerintah dikurangi dan mengedepankan masyarakat di daerah sebagai motor penggerak yang optimal. Pemberdayaan masyarakat merupakan suatu proses dimana masyarakat didukung agar mampu meningkatkan kesejahteraannya dengan mandiri baik dari sisi pendidikan, kesehatan dan ekonomi. Pemberdayaan diartikan sebagai upaya memenuhi kebutuhan individu, kelompok dan masyarakat luas agar mereka memiliki kemampuan untuk melakukan pilihan, mengontrol lingkungannya dan dapat memenuhi keinginannya, termasuk aksesibilitasnya terhadap sumberdaya. Pemberdayaan masyarakat melalui TTG dan Kegiatan Posyandu bertujuan untuk meningkatkan keberdayaan masyarakat agar mandiri dalam memecahkan persoalannya sehingga mampu meningkatkan kualitas pembangunan manusianya yang ditandai dengan meningkatnya taraf pendidikan, ekonomi dan kesehatan.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2010 tentang Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengelolaan Teknologi Tepat Guna, menjelaskan bahwa sasaran dari pemberdayaan masyarakat melalui pengelolaan teknologi tepat guna meliputi: (1) Masyarakat pengangguran, putus sekolah dan keluarga miskin, (2) Masyarakat yang memiliki usaha mikro, kecil dan menengah, dan (3) Pos Pelayanan Teknologi Tepat Guna (Posyantek) di kecamatan dan Warung Teknologi Tepat Guna (Wartek) di kelurahan.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengintegrasian Layanan Sosial Dasar di Posyandu juga menjelaskan bahwa posyandu bertujuan meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia Sejak dini dengan kegiatan yang terintegrasi dalam memberikan pelayanan dasar baik kesehatan, pendidikan dan ekonomi yang dilakukan dari masyarakat, oleh masyarakat dan untuk masyarakat.

Target kinerja pada tahun 2017 dari Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Kelurahan dengan kegiatan Pemasyarakatan dan Permanfaatan Teknologi Tepat Guna yaitu terbentuknya wartek di 2 kelurahan di Kota Cirebon sudah mencapai target dengan terbentuknya wartek di Kelurahan Kejaksan dan Kelurahan Jagasatru. Target paket pameran terlaksana dengan baik dengan mengikuti kegiatan gelar TTG tingkat Provinsi Jawa Barat yang dilaksanakan di Kabupaten Majalengka.

Target Kinerja untuk kegiatan pembinaan Posyandu Tingkat Kota yaitu tercapainya 1 Posyandu Mandiri pada Tahun 2017 sudah mencapai target yaitu 5 Posyandu mandiri yang berlokasi masing-masing 1 posyandu di setiap wilayah kecamatan dan Kota Cirebon mendapat peringkat dua (2) Posyandu Terbaik Tingkat Provinsi Jawa Barat pada Tahun 2017.

Sasaran Strategis 4

- (4) Meningkatnya Tertib Administrasi Kelurahan dengan Indikator Kinerja Meningkatnya pengetahuan dan pelayanan Aparatur Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan

Keberadaan Perangkat Kecamatan dimana kelurahan sebagai perangkat kecamatan yang juga disertai tugas dibidang administrasi, menduduki posisi yang sangat penting karena sebagai organ pemerintahan yang paling bawah mengetahui secara pasti segala kondisi dan permasalahan yang ada di wilayahnya, maka input pada pemerintah kecamatan yang menyangkut berbagai keterangan dan informasi sangatlah dibutuhkan dalam pengambilan kebijaksanaan daerah maupun nasional untuk kebutuhan pembangunan secara menyeluruh.

Dalam Permendagri Nomor 12 tahun 2013 tentang monografi desa dan kelurahan mengatakan Kepala desa dan Lurah melakukan pengisian dan pengumpulan data monografi desa dan kelurahan dimulai pada setiap awal dan pertengahan tahun anggaran dan dalam Permendagri Nomor 81 tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan di jelaskan bahwa kelurahan diwajibkan membuat Profil Desa/ Kelurahan yang ajakn dijadikan sebagai dasar dalam melaksanakan evaluasi diri di Tingkat Kelurahan sebagai evaluasi kinerja pemerintahan kelurahan yang akan ditindaklanjuti oleh Tim Evaluasi Perkembangan Desa/Kelurahan secara berjenjang mulai dari

Kecamatan sampai tingkat pusat. Dan hasil EPDeskel akan dijadikan dasar sebagai lomba kelurahan secara berjenjang mulai dari tingkat kecamatan, kab/kota, Provinsi dan Tingkat Regional.

Target kinerja untuk kegiatan ini yaitu terpilihnya 4 empat kelurahan terbaik tingkat Kota Cirebon pada tahun 2017 dan out putnya yaitu terpilihnya empat kelurahan terbaik tingkat Kota Cirebon pada Tahun 2017 yaitu : Peringkat 1). Kelurahan Pekiringan; 2). Kelurahan Panjunan; 3) Kelurahan Pulasaren dan ke (4) Kelurahan Kejaksan.

Sasaran Strategis 5

- 5) Meningkatnya swadaya masyarakat dengan indikator kinerja Meningkatnya nilai swadaya/partisipasi masyarakat dalam stimulan bantuan RW

Swadaya dalam pengertiannya adalah kemampuan atau kekuatan sendiri sehingga swadaya masyarakat yaitu kemampuan suatu kelompok masyarakat baik berupa daya maupun dana untuk mewujudkan suatu pembangunan fisik maupun non fisik yang pengadaannya oleh masyarakat itu sendiri, karena didorong kepentingan, dibiayai dengan menggali kemampuan yang dimiliki oleh masyarakat, dimanfaatkan dan dipelihara pula oleh masyarakat. Swadaya masyarakat bisa berbentuk swadaya murni yang artinya seluruh pembiayaannya oleh masyarakat dan swadaya penunjang dimana masyarakat berpartisipasi sebagai akibat adanya bantuan pemerintah.

Swadaya pada indikator kinerja ini yaitu swadaya penunjang yaitu kemampuan suatu kelompok masyarakat yang timbul sebagai akibat adanya bantuan pemerintah berupa dana untuk mewujudkan suatu bangunan fisik dan atau non fisik yang penggabungannya oleh masyarakat itu sendiri karenan didorong oleh kepentingannya.

Target Kinerja untuk tahun 2017 yaitu meningkatnya partisipasi masyarakat dalam bantuan RW dengan target 10 % dari nilai bantuan RW sebesar Rp. 20.000.000/RW sebanyak 248 RW. Nilai partisipasi masyarakat yang terhimpun dari 248 RW pada Tahun 2017 yaitu rata-rata Rp. 2.000.000/RW dengan total swadaya masyarakat se-Kota Cirebon sebesar Rp. 495.000.000.

Rumus Indikator Kinerja :

$$\frac{\text{Nilai rata-rata Stimulan/Partisipasi Masyarakat dalam bantuan RW (Rp)}}{\text{Jumlah/Nilai Bantuan RW pada tahun tersebut (Rp)}} \times 100$$

Capaian Indikator Kinerja stimulan/partisipasi masyarakat dalam bantuan RW pada tahun 2017 yaitu Rp. 2.000.000/ Rp. 20.000.000 X 100 = 10 %.

Sasaran Strategis 6

(6) Meningkatnya kemandirian pengurus LKK dengan indikator kinerja Rasio Jumlah LKK yang dibina dibagi jumlah seluruh LKK

Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan adalah mitra pemerintah daerah yang memiliki peranan dalam memelihara dan melestarikan nilai-nilai kehidupan kemasyarakatan yang berdasarkan swadaya, kegotongroyongan dan kekeluargaan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan, ketentraman dan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat. Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan di Kota Cirebon bahwa yang termasuk dalam LKK di Kota Cirebon yaitu LPM, RW, RT, Karang Taruna dan PKK baik TP.PKK Kelurahan, TP.PKK Kecamatan dan TP.PKK Kota Cirebon.

Jumlah seluruh LKK di Kota Cirebon yaitu 1689 LKK dengan rincian : 248 RW, 1369 RT, 22 LPM, 22 Karang Taruna, 1 TP.PKK Kota, 5 TP.PKK Kecamatan dan 22 TP.PKK Kelurahan.

Indikator Kinerja dari meningkatnya kemandirian pengurus LKK yaitu Rasio Jumlah LKK yang dibina dibagi jumlah seluruh LKK dengan Rumus:

$$\frac{\text{Jumlah LKK yang dibina}}{\text{Jumlah Seluruh LKK}} \times 100$$

Capaian target kinerja tahun 2017 yaitu jumlah LKK yang dibina pada tahun 2017 adalah sejumlah 1672 dari 1689 LKK yang berada di Kota Cirebon (yang tidak dibina yaitu 17 Karang Taruna yang tidak aktif) sehingga capaian tahun 2017 yaitu sebesar 98,9% sudah melebihi target pada tahun 2017 yaitu 30% LKK yang dibina.

Berdasarkan data pada Tabel 3.1, terlihat bahwa dari 6 (enam) target indikator kinerja yang telah ditetapkan, sebanyak 2 (dua) indikator yang memenuhi target, yaitu :

- 1) Terbentuknya RW layak anak targetnya 2 RW realisasinya mencapai 5 RW yaitu di RW 10 Kel. Kesenden, RW 13 Kel. Pegambiran, RW 10 Kel. Pekiringan, RW 03 Kel. Pekalipan dan RW 06 Kel. Harjamukti sehingga persentasenya mencapai 250%.
- 2) Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Kelurahan dari target 2 wartek, 1 paket pameran TTG, 1 strata posyandu mandiri realisasi 2 wartek, 1 paket pameran TTG, 1 strata posyandu mandiri.
- 3) Meningkatnya tertib administrasi kelurahan dari target 4 kelurahan terealisasi 4 kelurahan.
- 4) Meningkatnya swadaya masyarakat dari target 10% terealisasi 10%.
- 5) Meningkatnya kemandirian pengurus LKK dari target 30% terealisasi 30%

Hanya 2 (dua) indikator sasaran strategis yang tidak mencapai target, yaitu :

- 1) Menurunnya jumlah PMKS, dari target turun sebesar 1%, terealisasi turun sebesar 0,744%;
- 2) Tertanganinya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak sebanyak 53 kasus, yang terdiri dari 17 orang kekerasan perempuan dan 36 kasus kekerasan pada anak. Kondisi ini lebih kecil dari target yang ditetapkan yaitu sebanyak 60 kasus. Sehingga perhitungan realisasinya menggunakan rumus “indikator bermakna negative” dan didapatkan hasil realisasinya sebesar 71,67%.

3.1.2. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Capaian Kinerja Tahun 2016 dengan Tahun 2017

Realisasi kinerja dan capaian kinerja Tahun 2017 sama dibandingkan realisasi kinerja Tahun 2016. Jika pada Tahun 2016 hanya 5 (lima) indikator yang memenuhi target, maka pada Tahun 2017 terdapat 5 (lima) indikator yang memenuhi target dan hanya 1 (satu) indikator yang tidak memenuhi target.

Tabel 3.2. Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2016 Dengan Tahun 2017

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	REALISASI		KETERANGAN
		2016	2017	
1. Tercapainya penurunan jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Menurunnya jumlah PMKS 5% pada Tahun 2018(Jumlah PMKS 73.628 orang)	Naik 5,99%	Naik 0,744%	
2. Terasilitasinya pengaduan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	Meningkatnya keterwakilan gender 30% dalam pembangunan, Rasio RW layak anak per kelurahan, Penanganan pengaduan	30%, 2RW/22 kel/100 KK Binaan, 45 Kasus (82,73%)	30%, 5RW/22 kel/100 KK Binaan, 53 Kasus (71,67%)	
3. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Kelurahan	Berkembangnya lembaga ekonomi kelurahan	5 posyantek, 3 wartek, 1 strata posyandu mandiri	1 wartek, 1 paket pameran TTG, 1 strata posyandu mandiri	
4. Meningkatnya tertib administrasi kkelurahan	Meningkatnya pengetahuan dan kemampuan pelayanan aparatur pemerintahan kecamatan dan kelurahan	4 kelurahan	4 kelurahan	
5. Meningkatnya swadaya masyarakat	Meningkatnya nilai partisipasi masyarakat/nilai bantuan RW	10%	10%	
6. Meningkatnya kemandirian pengurus LKK	Rasio jumlah pengurus LKK yang dibina	30%	30%	

Sumber : Sumber : Bidang Sosial, Bidang PP, Bidang PA, dan Bidang PM, UPTD RPSA, LIPOSOS, Panti Persinggahan dan Loka Bina Karya; Data diolah

Berdasarkan data pada tabel di atas, untuk urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta pemberdayaan masyarakat realisasi yang diperoleh semakin meningkat dan tidak ada perbedaan antara capaian Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2017. Pencapaian kinerja pada Tahun 2017 untuk 6 (enam) indikator sasaran bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak serta bidang Pemberdayaan Masyarakat lebih baik dibandingkan dengan capaian pada Tahun 2016, yaitu :

- 1) Meskipun terjadi kenaikan dan tidak memenuhi target, akan tetapi, kenaikan jumlah PMKS pada Tahun 2017 sebesar 0,744% jauh lebih kecil dibandingkan kenaikan jumlah PMKS pada Tahun 2016 yang sebesar 5,99%, dengan perhitungan Kenaikan jumlah PMKS Tahun 2017= $(108.437-109.250)/109.250=0,744\%$.
- 2) Meningkatnya keterwakilan gender 30% dalam pembangunan, Rasio RW layak anak per kelurahan, Penanganan pengaduan, artinya Terasilitasinya pengaduan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak dengan indikator kinerja Meningkatnya keterwakilan gender 30% dalam pembangunan, Rasio RW layak anak per kelurahan, Penanganan

pengaduan dengan target 3%, 2RW/22 kel/100 KK Binaan, 60 Kasus terealisasi 30%, 5 RW/22 kel/100KK binaan, 53 kasus, artinya dengan realisasi :

Terpenuhinya implementasi keterwakilan gender pada kegiatan pembangunan sebesar 30% dengan target terpenuhinya keterwakilan perempuan disektor publik, yaitu:

1. Perempuan menduduki jabatan strategis/pengambil keputusan, untuk eksekutif sebesar 43%.
2. Perempuan di parlemen sebesar 26%.
3. Perempuan di sektor yudikatif sebesar 4%.

Peningkatan peran perempuan dalam pembangunan pada kelurahan lokasi P2WKSS sebanyak 100KK binaan dan 20 kader perempuan sebagai motor penggerak pembangunan.

Terbentuknya RW layak anak targetnya 2 RW realisasinya mencapai 5 RW yaitu di RW 10 Kel. Kesenden, RW 13 Kel.Pegambiran, RW 10 Kel. Pekiringan, RW 03 Kel. Pekalipan dan RW 06 Kel. Harjamukti sehingga prosentasenya mencapai 250%.

terfasilitasinya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak pada tahun 2016 sebesar 82,73% dalam penanganan pengaduan yang mengalami penurunan di Tahun 2017 sebesar 71,67% yang tertangani, akan tetapi berbanding proposional dengan target yang telah ditetapkan, Tertanganinya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak sebanyak 53 kasus, yang terdiri dari 17 orang kekerasan perempuan dan 36 kasus kekerasan pada anak.

- 3) Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Kelurahan, berkembangnya lembaga ekonomi kelurahan terdiri atas 1 wartek di tahun 2017 dengan target 1 wartek teralisasi 1 wartek yaitu kelurahan Jagasatru dan 100% ditahun 2016.
- 4) Meningkatnya tertib administrasi kelurahan, untuk meningkatnya pengetahuan dan kemampuan pelayanan aparatur pemerintahan kecamatan dan kelurahan target 4 kelurahan realisasi 4 Kelurahan sebesar 100% di Tahun 2017 meliputi Kel. Pekiringan, Kel. Panjunan, Kel.Pulasaren dan Kel.Kejaksan, dan Tahun 2016 sebesar 100%.
- 5) Meningkatnya swadaya masyarakat dan meningkatnya nilai partisipasi masyarakat/nilai bantuan RW sebesar 10% yaitu Capaian Indikator Kinerja stimulan/partisipasi masyarakat dalam bantuan RW pada tahun

2017 yaitu Rp. 2.000.000/ Rp. 20.000.000 X 100 = 10 % dan Tahun 2016 sebesar 100%.

- 6) Meningkatnya kemandirian pengurus LKK yaitu rasio jumlah pengurus LKK yang dibina target 30% terealisasi sebesar 30% Capaian target kinerja tahun 2017 yaitu jumlah LKK yang dibina pada tahun 2017 adalah sejumlah 1672 dari 1689 LKK yang berada di Kota Cirebon (yang tidak dibina yaitu 17 Karang Taruna yang tidak aktif) sehingga capaian tahun 2017 yaitu sebesar 98,9% sudah melebihi target pada tahun 2017 yaitu 30% LKK yang dibina.

Selain 6 (enam) indikator yang capaian kerjanya lebih baik dari pada Tahun 2016, 2 (dua) indikator lain, tingkat capaiannya lebih rendah dibandingkan tingkat capaian Tahun 2016, yaitu :

1. Meskipun Terjadi Kenaikan dan tidak memenuhi target, akan tetapi, kenaikan jumlah PMKS pada Tahun 2017 sebesar 0,744% jauh lebih kecil dibandingkan kenaikan jumlah PMKS pada Tahun 2016 yang sebesar 5,99%.

Menurunnya jumlah KK miskin berdasarkan data PBI, RASTRA dan PKH pada tahun 2009 s/d 2014 sebesar 66,248 orang sedangkan pada tahun 2015 s/d 2017 berdasarkan hasil pemutakhiran basis data terpadu (PBDT) 2015 dengan jumlah 27.881 orang.

2. Tertanganinya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak Tahun 2017 sebanyak 53 kasus, yang terdiri dari 17 orang kekerasan perempuan dan 36 kasus kekerasan pada anak. Kondisi ini lebih kecil dari target yang ditetapkan yaitu sebanyak 60 kasus. Sehingga perhitungan realisasinya menggunakan rumus “indikator bermakna negative” dan didapatkan hasil realisasinya sebesar 71,67%, dibandingkan mengalami penurunan dibandingkan Tahun 2016 sebesar 82,73%.

3.1.3. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2017 dengan Target Jangka Menengah (RENSTRA)

Untuk melihat keberhasilan pencapaian Tahun 2017 dibandingkan dengan target RENSTRA, maka di bawah ini diperlihatkan perbandingan antara realisasi kinerja dan capaian kinerja Tahun 2017 dengan target RENSTRA sebagai berikut :

Tabel 3.3. Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2017 Dengan Target RENSTRA

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja/ Target RENSTRA	Target 2017	Realisasi 2017	Keterangan
1. Tercapainya penurunan jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Menurunnya jumlah PMKS 5% pada Tahun 2018(Jumlah PMKS 73.628 orang)	737 orang (1%)	Naik 0,744%	Naik, target tidak terpenuhi
2. Terasilinasinya pengaduan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	Meningkatnya keterwakilan gender 30% dalam pembangunan, Rasio RW layak anak per kelurahan, Penanganan pengaduan	3%, 2RW/22 kel/100 KK Binaan, 60 Kasus	3%, 5RW/22 kel/100 KK Binaan, 53 Kasus (71,67%)	Target terpenuhi, Terpenuhinya implementasi keterwakilan gender pada kegiatan pembangunan sebesar 30% dengan target dan realisasinya 2 instansi, hal ini kurang tepat. Kondisi eksisting yang dimaksud adalah keterwakilan gender pada parlemen jadi outputnya adalah jumlah perempuan, Terbentuknya RW layak anak targetnya 2 RW realisasinya mencapai 5 RW yaitu di RW 10 Kel. Kesenden, RW 13 Kel.Pegambiran, RW 10 Kel. Pekiringan, RW 03 Kel. Pekalipan dan RW 06 Kel. Harjamukti sehingga prosentasenya mencapai 250% . Tertanganinya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak sebanyak 53 kasus, yang terdiri dari 17 orang kekerasan perempuan dan 36 kasus kekerasan pada anak. Kondisi ini lebih kecil dari target yang ditetapkan yaitu sebanyak 60 kasus. Sehingga perhitungan realisasinya menggunakan rumus “indikator bermakna negative” dan didapatkan hasil realisasinya sebesar 71,67%.
3. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Kelurahan	Berkembangnya lembaga ekonomi kelurahan	1 wartek, 1 paket pameran TTG, 1 strata posyandu mandiri	1 wartek, 1 paket pameran TTG, 1 strata posyandu mandiri	Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Kelurahan, berkembangnya

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) - 2017

				lembaga ekonomi kelurahan terdiri atas 1 wartek di tahun 2017 dengan target 1 wartek teralisasi 1 wartek yaitu kelurahan Jagasatru.
4. Meningkatnya tertib administrasi kkelurahan	Meningkatnya pengetahuan dan kemampuan pelayanan aparatur pemerintahan kecamatan dan kelurahan	4 Kelurahan	4 Kelurahan	Kel. Pekiringan, Kel. Panjunan, Kel.Pulasaren dan Kel.Kejaksan
5. Meningkatnya swadaya masyarakat	Meningkatnya nilai partisipasi masyarakat/nilai bantuan RW	10%	10%	Meningkatnya swadaya masyarakat dan meningkatnya nilai partisipasi masyarakat/nilai bantuan RW sebesar 10% yaitu Capaian Indikator Kinerja stimulan/partisipasi masyarakat dalam bantuan RW pada tahun 2017 yaitu Rp. 2.000.000/ Rp. 20.000.000 X 100 = 10 % dan Tahun 2016 sebesar 100%.
6. Meningkatnya kemandirian pengurus LKK	Rasio jumlah pengurus LKK yang dibina	30%	30%	Meningkatnya kemandirian pengurus LKK yaitu rasio jumlah pengurus LKK yang dibina target 30% terealisasi sebesar 30% Capaian target kinerja tahun 2017 yaitu jumlah LKK yang dibina pada tahun 2017 adalah sejumlah 1672 dari 1689 LKK yang berada di Kota Cirebon (yang tidak dibina yaitu 17 Karang Taruna yang

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) - 2017

				tidak aktif) sehingga capaian tahun 2017 yaitu sebesar 98,9% sudah melebihi target pada tahun 2017 yaitu 30% LKK yang dibina.
--	--	--	--	---

Hasil pencapaian kinerja pada Tahun 2017 dibandingkan dengan target jangka menengah seperti dituangkan dalam RENSTRA, didapat data bahwa dari 6 (enam) indikator sasaran, hanya 2 (dua) indikator yang belum memenuhi target, yaitu penurunan jumlah PMKS dan penanganan pengaduan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.

3.1.4. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Tahun 2017 dengan Standar Nasional

Dari 7 (tujuh) indikator sasaran strategis yang telah ditetapkan, hanya 3 (tiga) indikator yang memiliki nilai standar nasional, seperti tercantum dalam tabel berikut ini :

Tabel 3.4. Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2017 Dengan Standar Nasional

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja/ Target RENSTRA	Target Nasional (SPM) Tahun 2017	Realisasi 2017	Keterangan
1. Tercapainya penurunan jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Menurunnya jumlah PMKS 5% pada Tahun 2018	Tidak ada Nilai SPM	Naik 0,744%	-
2. Terasilitasinya pengaduan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	Meningkatnya keterwakilan gender 30% dalam pembangunan, Rasio RW layak anak per kelurahan, Penanganan pengaduan	Tidak ada Nilai SPM	-	-
3. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Kelurahan	Berkembangnya lembaga ekonomi kelurahan	Tidak ada Nilai SPM	-	-
4. Meningkatnya tertib administrasi kelurahan	Meningkatnya pengetahuan dan kemampuan pelayanan aparaturnya pemerintahan kecamatan dan kelurahan	Tidak ada Nilai SPM	-	-
5. Meningkatnya swadaya masyarakat	Meningkatnya nilai partisipasi masyarakat/nilai bantuan RW	Tidak ada Nilai SPM	-	-

6. Meningkatnya kemandirian pengurus LKK	Rasio jumlah pengurus LKK yang dibina	Tidak ada Nilai SPM	-	-
--	---------------------------------------	---------------------	---	---

Dari 6 (enam) indikator dan tidak memiliki standar nasional, yaitu (1) Menurunnya jumlah PMKS 5% pada Tahun 2018; (2) Meningkatnya keterwakilan gender 30% dalam pembangunan, RasioRW layak anak per kelurahan, Penanganan pengaduan; (3) Berkembangnya lembaga ekonomi kelurahan; (4) Meningkatnya pengetahuan dan kemampuan pelayanan aparatur pemerintahan kecamatan dan kelurahan; (5) Meningkatnya nilai partisipasi masyarakat/nilai bantuan RW; (6) Rasio jumlah pengurus LKK yang dibina, keenamnyanya tidak memiliki target Nasional.

3.1.5. Analisis dan Alternatif Solusi

A. Analisis

Berdasarkan data-data yang telah ditampilkan pada butir sebelumnya, maka dapat dianalisis penyebab peningkatan dan penurunan kinerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Cirebon Tahun 2017, yaitu sebagai berikut :

A.1. Penyebab Peningkatan Kinerja

Dari 6 (enam) indikator kinerja yang telah ditetapkan, terdapat 5 (lima) indikator yang pada Tahun 2017 ini mengalami peningkatan kinerja dibandingkan Tahun 2016, yaitu :

1. Terbentuknya RW layak anak targetnya 2 RW realisasinya mencapai 5 RW yaitu di RW 10 Kel. Kesenden, RW 13 Kel. Pegambiran, RW 10 Kel. Pekiringan, RW 03 Kel. Pekalipan dan RW 06 Kel. Harjamukti sehingga persentasenya mencapai 250%.

Terpenuhinya implementasi keterwakilan gender pada kegiatan pembangunan sebesar 30% dengan target terpenuhinya keterwakilan perempuan disektor publik, yaitu:

1. Perempuan menduduki jabatan strategis/pengambil keputusan, untuk eksekutif sebesar 43%.
2. Perempuan di parlemen sebesar 26%.
3. Perempuan di sektor yudikatif sebesar 4%.

2. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Kelurahan, berkembangnya lembaga ekonomi kelurahan terdiri atas 1 wartek di tahun 2017 dengan target 1 wartek teralisasi 1 wartek yaitu kelurahan Jagasatru.
3. Meningkatnya tertib administrasi kelurahan, untuk meningkatnya pengetahuan dan kemampuan pelayanan aparatur pemerintahan kecamatan dan kelurahan target 4 kelurahan realisasi 4 Kelurahan sebesar 100% di Tahun 2017 meliputi Kel. Pekiringan, Kel. Panjunan, Kel.Pulasaren dan Kel.Kejaksan, dan Tahun 2016 sebesar 100%.
4. Target Kinerja untuk tahun 2017 yaitu meningkatnya partisipasi masyarakat dalam bantuan RW dengan target 10 % dari nilai bantuan RW sebesar Rp. 20.000.000/RW sebanyak 248 RW. Nilai partisipasi masyarakat yang terhimpun dari 248 RW pada Tahun 2017 yaitu rata-rata Rp. 2.000.000/RW dengan total swadaya masyarakat se-Kota Cirebon sebesar Rp. 495.000.000.

Rumus Indikator Kinerja :

Nilai rata-rata Stimulan/Partisipasi Masyarakat dalam bantuan RW (Rp)

X 100

Jumlah/Nilai Bantuan RW pada tahun tersebut (Rp)

Capaian Indikator Kinerja stimulan/partisipasi masyarakat dalam bantuan RW pada tahun 2017 yaitu Rp. 2.000.000/ Rp. 20.000.000 X 100 = 10 % dan 100% di tahun 2016.

5. Meningkatnya kemandirian pengurus LKK yaitu rasio jumlah pengurus LKK yang dibina target 30% terealisasi sebesar 30% Capaian target kinerja tahun 2017 yaitu jumlah LKK yang dibina pada tahun 2017 adalah sejumlah 1672 dari 1689 LKK yang berada di Kota Cirebon (yang tidak dibina yaitu 17 Karang Taruna yang tidak aktif) sehingga capaian tahun 2017 yaitu sebesar 98,9% sudah melebihi target pada tahun 2017 yaitu 30% LKK yang dibina dan 100% di Tahun 2016.

Penyebab peningkatan kinerja tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

- 1) Adanya validasi dan verifikasi terhadap jumlah PMKS yang dilakukan oleh Bidang Sosial terhadap jumlah PMKS, berkaitan dengan jumlah fakir miskin menurut Keputusan Menteri Sosial RI Nomor : 351/HUK/2016 tentang Penetapan Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Tahun 2017;

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) - 2017

- 2) Terpenuhinya implementasi keterwakilan gender pada kegiatan pembangunan sebesar 30% dengan target 2 instansi/skpd dan realisasinya 2 instansi/skpd sesuai dengan target yang telah ditetapkan.
- 3) Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Kelurahan, berkembangnya lembaga ekonomi kelurahan terdiri atas 5 posyantek, 3 Wartek, 1 strata posyandu mandiri sebesar 100% di tahun 2016 dan 1 Wartek, 1 paket pameran TTG dan 1 strata posyandu mandiri sebesar 100% di tahun 2017.
- 4) Meningkatnya tertib administrasi kelurahan, untuk meningkatnya pengetahuan dan kemampuan pelayanan aparatur pemerintahan kecamatan dan kelurahan sebesar 100% ditahun 2016 dan 100% di tahun 2017.
- 5) Meningkatnya swadaya masyarakat dan meningkatnya nilai partisipasi masyarakat/nilai bantuan RW sebesar 100% ditahun 2016 dan 100% di tahun 2017.
- 6) Meningkatnya kemandirian pengurus LKK yaitu rasio jumlah pengurus LKK yang dibina sebesar 100% ditahun 2016 dan tahun 2017 sebesar 100%.

Data Prestasi dan Penghargaan tahun 2017

No.	Bidang	Prestasi yang diperoleh	Keterangan
1.	Perlindungan Anak (PA)	1.Kota Layak Anak (Pratama)	1.Kementrian PP & PA 2.Propinsi Jawa Barat
2.	1.Perlindungan Anak 2.Pemberdayaan Perempuan	1.P2TP2A Maju 2.P2TP2A Kreatif	P2TP2A Provinsi Jawa Barat
3.	Pemberdayaan Perempuan	Kepala Dinsos PPA Kota Cirebon sebagai Pembina Terbaik P2WKSS Kategori Kota Tingkat Provinsi Jawa Barat	Tingkat Provinsi Jawa Barat
4.	Pemberdayaan Perempuan	Kota Cirebon Juara 2 Lomba Program Terpadu P2WKSS Peran Perempuan Kategori Kota Tingkat	Tingkat Provinsi Jawa Barat

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) - 2017

		Provinsi Jawa Barat	
5.	Pemberdayaan Masyarakat	Juara 3 Kategori Kreasi Penampilan, Penyajian Menu, dan Aplikasi Lomba Cipta Menu TK. Propinsi	Tingkat Provinsi Jawa Barat
6.	Pemberdayaan Masyarakat	Juara 3 Lomba Kreasi Cipta Dahar Pangan Kategori PKK (Festifal Keanekaragaman Makanan Berbahan Baku Lokal)	Tingkat Provinsi Jawa Barat
7.	Pemberdayaan Masyarakat	Juara 3 Pelaksana Lingkungan Bersih dan Sehat (LBS) Tk. Propinsi (TP PKK Kelurahan Larangan)	Tingkat Provinsi Jawa Barat (setifikat sedang dalam proses)
8.	Pemberdayaan Masyarakat	Juara 2 Pelaksana Lingkungan Bersih dan Sehat (PHBS) Tk. Propinsi (TP PKK Kelurahan Larangan)	Tingkat Provinsi Jawa Barat (setifikat sedang dalam proses)
9.	Pemberdayaan Masyarakat	Juara 2 Pelaksana Terbaik Hatinya PKK Tk. Propinsi (TP PKK Kelurahan Larangan)	Tingkat Provinsi Jawa Barat (setifikat sedang dalam proses)
10.	Pemberdayaan Masyarakat	Juara 1 Pelaksanaan Terbaik Tertib Administrasi 10 Program PKK Tk. Propinsi	Tingkat Provinsi Jawa Barat (setifikat sedang dalam proses)

A.2. Penyebab Penurunan Kinerja

Dari 6 (enam) indikator kinerja yang telah ditetapkan, terdapat 2 (dua) indikator yang pada Tahun 2017 ini mengalami penurunan kinerja dibandingkan Tahun 2016, yaitu :

- 1). Meskipun Terjadi kenaikan dan tidak memenuhi target, akan tetapi, kenaikan jumlah PMKS pada Tahun 2017 sebesar 0,744% jauh lebih kecil dibandingkan kenaikan jumlah PMKS pada Tahun 2016 yang sebesar 5,99%.

- 2). Belum adanya bangunan/gedung RPSA (rumah Persinggahan Sosial Anak), LIPOSOS (Lingkungan Pondok Sosial) dan LBK (Loka Bina Karya).
- 3). Belum adanya regulasi di daerah tentang Pengarustamakan Gender (PUG).
- 4). Belum semua kelurahan membentuk Forum Anak dari 22 kelurahan baru 5 kelurahan yang membentuk Forum Anak, dan sulitnya Data Profil Anak untuk masing-masing OPD yang terkait dengan KLA (Kota Layak Anak).
- 5). Penanganan pengaduan, artinya terfasilitasinya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak pada tahun 2016 sebesar 82,73% (target 59 realisasi 45) dalam penanganan pengaduan yang tertangani berbanding turun dengan tahun 2017 sebesar 71,67% yang tertangani, Tertanganinya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak sebanyak 53 kasus, yang terdiri dari 17 orang kekerasn perempuan dan 36 kasus kekerasan pada anak. Kondisi ini lebih kecil dari target yang ditetapkan yaitu sebanyak 60 kasus. Sehingga perhitungan realisasinya menggunakan rumus “indikator bermakna negative” dan didapatkan hasil realisasinya sebesar 71,67%, sehingga dalam penanganan pengaduan ini perlunya kemitraan dalam penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak (KTPA)
- 6). Kurangnya jumlah SDM (sumber daya manusia) dengan 4 urusan yang harus ditangani oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan (PP) dan Perlindungan Anak (PA) serta Pemberdayaan Masyarakat (PM) yang berjumlah 37 pegawai bertipe dinas A.

B. Alternatif Solusi

Untuk mengatasi penyebab penurunan/tetapnya kinerja bidang sosial, bidang pemberdayaan perempuan, bidang perlindungan anak dan bidang pemberdayaan masyarakat, alternatif solusi yang dapat dilakukan antara lain :

- 1) Berubah target dan sasaran Renstra SKPD lebih kecil dalam meningkatkan kualitas penanganan masalah kesejahteraan sosial dalam mencapai peningkatan Penanganan Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), terbatasnya anggaran APBD dan APBN serta kurangnya jumlah Sumber Daya Manusia pada Bidang Sosial.

- 2) Merubah Indikator Utama (IKU) tentang Rasio Gender diatas 30% Perempuan artinya
Meningkatnya keterwakilan gender 30% dalam pembangunan, artinya Terpenuhinya implementasi keterwakilan gender pada kegiatan pembangunan sebesar 30% dengan target dan realisasinya 2 instansi, hal ini kurang tepat. Kondisi eksisting yang dimaksud adalah keterwakilan gender pada parlemen jadi outputnya adalah jumlah perempuan.
- 7). Merubah target lebih kecil dalam penanganan pengaduan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak karena Penanganan pengaduan, artinya terfasilitasinya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak pada tahun 2016 sebesar 82,73%(target 59 realisasi 45) dalam penanganan pengaduan yang tertangani berbanding turun dengan tahun 2017 sebesar 71,67% yang tertangani, Tertanganinya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak sebanyak 53 kasus, yang terdiri dari 17 orang kekerasn perempuan dan 36 kasus kekerasan pada anak. Kondisi ini lebih kecil dari target yang ditetapkan yaitu sebanyak 60 kasus. Sehingga perhitungan realisasinya menggunakan rumus “indikator bermakna negative” dan didapatkan hasil realisasinya sebesar 71,67%.

3.1.6. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Penggunaan sumber daya pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak selama Tahun 2017 cukup optimal, baik sumber daya manusia maupun anggaran. Penggunaan anggaran biaya langsung mencapai 96,80% dari total anggaran sebesar Rp 8.867.765.889,00,-. Sedangkan penggunaan sumber daya manusia digunakan secara maksimal untuk melaksanakan semua tugas pokok dan fungsi sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

3.1.7. Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Analisis mengenai program dan kegiatan yang dilakukan untuk mendukung pernyataan kinerja yang telah ditetapkan oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Cirebon Tahun Anggaran 2017 serta anggaran perubahan adalah sebagai berikut :

Misi I: Meningkatkan Kualitas Penanganan Masalah Kesejahteraan Sosial.

Kegiatan untuk mencapai misi ini dilaksanakan oleh Bidang Sosial dengan UPTD yang terkait dengan Bidang Sosial, yaitu UPTD Lingkungan Pondok Sosial, Panti Persinggahan dan Loka Bina Karya; UPTD Taman Makam Pahlawan dan Nilai-Nilai Kepahlawanan serta UPTD Rumah Perlindungan Sosial Anak.

Untuk mencapai Misi I ini, program dan kegiatan yang dilaksanakan Tahun 2017, adalah sebagai berikut :

Tabel 3.5. Capaian Kinerja Bidang Sosial Tahun 2017

Nama Program dan Kegiatan	Jumlah Anggaran (Rp)	Target Kinerja	Realisasi Capaian Tahun 2017	% Capaian
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	884.668.500,00		878.765.000,00	99,33%
(Dalam Penetapan Kinerja)				
1. Pelayanan dan Perlindungan Sosial, Hukum bagi Korban Eksploitasi, Perdagangan Perempuan dan Anak: Terlindunginya PMKS anak jalanan	50.000.000,00	60 anak	60 anak	100%
2. Peningkatan kualitas pelayanan, sarana dan prasarana rehabilitasi kesejahteraan sosial bagi PMKS Tersediaanya alat bantu bagi penyandang disabilitas	53.000.000,00	65 orang	65 orang	99,59%
3. Jaminan Sosial Bagi PMKS Tersediaanya bantuan bagi PMKS lansia terlantar	53.000.000,00	50 orang	50 orang	100%
4. Program Keluarga Harapan	450.000.000,00		445.440.000,00	98,99%
a. Terpenuhinya biaya operasional kelembagaan PKH		6 Sekretariat	6 Sekretariat	100%
b. Terpenuhinya KUBE PKH (KSM)		10 Kelompok	10 Kelompok	100%
c. Tercapainya kompetensi dan sinergitas UPPKH Kota, pendamping dan operator PKH		3 Kali	3 Kali	100%
d. Tersediaanya laporan evaluasi pelaksanaan PKH		1 Dok	1 Dok	100%
e. Tersediaanya komputer		1 Unit	1 Unit	100%
f. Tersediaanya printer		1 Unit	1 Unit	100%
5. Pengembangan dan Pemberdayaan Kesejahteraan Sosial Tersediaanya laporan hasil survey dan monev kegiatan bantuan rumah	53.000.000,00	2 Laporan	2 Laporan	100%

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) - 2017

robok					
Program Penguatan Jejaring Kemitraan Dalam Rangka Penanganan PMKS	121.000.000,00			121.000.000,00	100%
6. Peningkatan Jejaring Kerjasama Pelaku-Pelaku Usaha Kesejahteraan Sosial Masyarakat	70.000.000,00			70.000.000,00	100%
Tersediaanya kesepakatan (MoU) Penanganan PMKS		2 MoU	2 MoU		100%
Terbinanya pengurus organisasi sosial/lembaga kesejahteraan sosial		60 orang	60 orang		100%
Terbinanya TAGANA		35 orang	35 orang		100%
7. Peningkatan Pelestarian Nilai-Nilai Kepahlawanan dan Kesetiakawanan Sosial	51.000.000,00			51.000.000,00	100%
Tersediaanya bantuan sembako bagi anggota veteran di peringatan HKSAN		33 orang	33 orang		100%
Terpeliharanya TMP (Taman Makam Pahlawan)		10 bulan	10 bulan		100%
Program Peningkatan Korban Bencana	34.668.500,00			33.502.000,00	96,64
8. Penanggulangan Masalah-Masalah Strategi Yang Menyangkut Tanggap Cepat Darurat dan Kejadian Luar Biasa	34.668.500,00			33.502.000,00	96,64
Tersediaanya Bufferstok bagi korban bencana alam dan sosial		8 Jenis	8 Jenis		100%
Program Satu Data Keluarga Miskin	70.000.000,00			70.000.000,00	100%
9. Penyusunan Data PMKS dan PSKS					
Tersediaanya data fakir miskin yang tervalidasi		1 Dok	1 Dok		100%
Tersediaanya petugas verifikasi dan validasi data yang terampil		49 orang	49 orang		100%
Capaian Rata-Rata Seluruh Kegiatan					99,33%

Berdasarkan data pada tabel di atas, terlihat bahwa capaian kinerja dari program dan kegiatan untuk menunjang pelaksanaan Misi I secara rata-rata mencapai 99,33% atau klasifikasi “Baik” dikarenakan nilainya melebihi 85%.

Selain program dan kegiatan di atas, untuk menunjang misi I dilakukan pula strategi peningkatan pelayanan administrasi perkantoran, sarana prasarana dan sumber daya aparatur, dengan kebijakan :

1. Meningkatkan pelayanan administrasi perkantoran.
2. Meningkatkan pelayanan sarana dan prasarana aparatur.
3. Meningkatkan pelayanan sumber daya aparatur.
4. Meningkatkan kinerja dan sistem pelaporan.

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) - 2017

Untuk melaksanakan kebijakan tersebut, maka Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Cirebon pada Tahun 2017 melaksanakan program dan kegiatan berikut ini sekaligus tingkat pencapaiannya

Tabel 3.6. Capaian Kinerja Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran, Sarana Prasarana Dan Sumber Daya Aparatur

Nama Program dan Kegiatan		Jumlah Anggaran (Rp)	Target	Realisasi	% Capaian
[1]		[2]	[3]	[4]	[5]
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		808.693.289,00		766.213.833,00	95,01%
1.	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	158.145.500,00		155.845.500,00	99,81%
	Tersedianya petugas kebersihan kantor & peralatan kebersihan kantor selama 12 bulan		7 orang	7 orang	100%
			18 jenis	18 jenis	100%
2.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	25.200.000,00		25.200.000,00	100%
	Terpenuhinya surat khabar selama 12 bulan		3 Jenis	3 Jenis	100%
3.	Penyediaan Makanan dan Minuman	43.784.500,00		42.141.900,00	96,25%
			11 Bulan	11 Bulan	100%
	Tersedianya bahan makanan dan minuman harian, rapat dan tamu		6 Bulan	6 Bulan	100%
			168 dus	168 dus	100%
4.	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	307.375.000,00		290.269.634,00	94,44%
	Terpenuhinya rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah dalam provinsi dan luar provinsi		1 Paket	1 Paket	100%
5.	Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor	58.162.500,00		56.982.500,00	97,97%
	Tersedianya petugas pengamanan kantor selama 12 bulan		2 Orang	2 Orang	100%
6.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat, Alat Tulis Kantor, Barang Cetak dan Penggandaan	88.098.100,00		84.847.600,00	97,0%
			480 Buah	480 Buah	100%
	Tersedianya materi 6000 & 3000 selama 12 bulan, tersedianya ATK selama 12 bulan, tersedianya barang cetakan dan penggandaan selama 12 bulan		1080 Buah	1080 Buah	100%
			55 Jenis	55 Jenis	100%
			12 Jenis	12 Jenis	100%
7.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, Listrik dan Logistik	91.965.189,00		77.563.899,00	85,0%
	Terbayarnya rekening listrik, air, ledeng, telepon, selama 12 bulan		5 Gedung Kantor	5 Gedung Kantor	100%

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) - 2017

	dan tersedianya isi ulang tabung gas selama 12 bulan		24 Kali	24 Kali	100%
8.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional dan Jaminan Barang Milik Daerah	37.962.500,00		33.362.800,00	87,88%
	Terbayarnya pajak kendaraan dinas selama 12 bulan dan terlindunginya kendaraan dinas selama 12 bulan		6 Unit R 4	6 Unit R 4	100%
			15 Unit R 2	15 Unit R 2	100%
Program Peningkatan Disiplin Aparatur		66.025.000,00		58.919.000,00	100%
1.Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya		66.025.000,00		58.919.000,00	90%
Tersediaanya pakaian olah raga dan PDH			38 Stel	38 Stel	100%
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		382.137.000,00		350.448.950,00	92%
1.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	28.380.600,00		28.380.600,00	100,00%
	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor selama 12 bulan & terpeliharanya pemeliharaan 5 gedung kantor		12 Jenis	12 Jenis	100,00%
			25 Jenis bahan material	25 Jenis bahan material	100,00%
2.	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional/Jabatan	64.849.000,00		61.750.000,00	95,22%
	Tersedianya kendaraan dinas operasional roda 2		3 Unit	3 Unit	100%
3.	Pengadaan Perlengkapan/Peralatan Gedung Kantor	135.137.400,00		132.285.00,00	97,89%
	Terpenuhinya sarana & prasarana peralatan gedung kantor :				
	- AC		5 Unit	5 Unit	100%
	- Komputer PC		5 unit	5 Unit	100%
	- Laptop		3 Unit	3 Unit	100%
	- Printer		4 Unit	4 Unit	100%
	- Brank Kas		1 Unit	1 Unit	100%
	- Dispenser		1 Unit	1 Unit	100%
	- TV		1 Unit	1 Unit	100%
	- Mesin penghancur kertas		1 Unit	1 Unit	100%
	- Kursi Tunggu Tamu		2 Set	2 Set	100%
	- Sound System		1 Set	1 Set	100%
4.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Jabatan	130.770.000,00		105.033.350,00	80,1%

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) - 2017

	Terpeliharanya kendaraan dinas jabatan roda 4 dan roda 2		6 Unit	6 Unit	100,00%
			15 Unit	15 Unit	100,00%
5.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan/Peralatan Gedung Kantor				
	Tersediaanya peralatan gedung kantor:				
	Komputer/laptop		30 unit	30 unit	100,00%
	Printer		26 unit	26 unit	100,00%
	AC		20 unit	20 unit	100,00%
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		235.398.000,00		229.093.000,00	98%
1.	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	52.724.000,00		52.724.000	100,00%
	Tersusunnya program kerja, laporan triwulan, laporan tahunan, dokumen IKK dan LPPD, laporan LAKIP, Laporan penatausahaan barang dan inventaris barang		9 Dok		
2.	Penyusunan dan Publikasi Profil SKPD	48.157.000,00		47.835.000,00	99,33%
	Tersusunnya profil SKPD tahun 2017		1 Buku	1 Buku	100,00%
3.	Penyusunan Pelaporan Keuangan SKPD	43.375.000,00		43.375.000,00	100,00%
	Tersusunnya laporan keuangan th 2017 dan tersediaanya laporan evaluasi penyerapan realisasi anggaran		2 Dok	2 Dok	100,00%
4.	Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD	33.255.000,00		33.255.000,00	100,00%
	Tersusunnya renja SKPD perubahan th 2017, renja SKPD th 2018		2 Dok	2 Dok	100,00%
5.	Penyusunan Pedoman Kinerja SKPD	7.007.000,00		7.007.000,00	100,00%
	Tersusunnya SPM bidang Sosial tahun 2017		1 Dok	1 Dok	100,00%
6.	Tersusunnya RKA tahun 2018, DPA tahun 2018, RKA P dan DPAP 2017		4 Dok	4 Dok	100,00%
Capaian Rata-rata					97%

Berdasarkan data pada tabel di atas, terlihat bahwa meskipun capaian kinerja dari program dan kegiatan belum mencapai 100%, akan tetapi sudah termasuk klasifikasi “Baik” dikarenakan nilainya melebihi 85%, yaitu sebesar 97,00%. Faktor penyebab beberapa kegiatan tidak mencapai target antara lain adalah sebagai berikut :

1. Adanya harga penawaran dari pihak ketiga/Efisiensi harga penawaran;

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) - 2017

2. Pengiriman laporan/surat ke Kementerian Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pemberdayaan masyarakat dan Disnos serta Dinas BP3AKB Provinsi Jabar dilakukan dengan melakukan kunjungan (perjalanan dinas bersamaan dengan diselenggarakannya kegiatan di sana;
3. Pembayaran pajak kendaraan disesuaikan dengan tarif yang tercantum dalam STNK
4. Pembelian BBM disesuaikan dengan Fluktuasi harga Pertamina
5. Adanya pengurangan jumlah pegawai (pindah dan pensiun);
6. Perjalanan dinas dilakukan sesuai undangan/perintah.
7. Untuk Mamin dalam Penyusunan RKA/DPA SKPD Tahun 2018 tidak diserap dikarenakan s.d. 30 Desember belum ada jadwal penyusunan DPA untuk tahun anggaran 2018.

Misi 2, strategi:

a. Meningkatkan kualitas hidup perempuan dan anak :

Peningkatan kualitas hidup perempuan dan anak

Kegiatan untuk mencapai misi ini dilaksanakan oleh Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Bidang Perlindungan Anak

Untuk mencapai Misi II ini, program dan kegiatan yang dilaksanakan Tahun 2017 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.7. Capaian Kinerja Bidang Pemberdayaan Perempuan (PP)

Nama Program dan Kegiatan	Jumlah Anggaran (Rp)	Target Kinerja	Realisasi Capaian Tahun 2017	% Capaian
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
(Dalam Penetapan Kinerja)				
Program Penguatan Kelembagaan Pengarustamakan Gender dan Anak	201.410.000,00		200.210.000,00	99,40%
1. Penguatan Kelembagaan Pengarustamakan Gender dan Anak	201.410.000,00		200.210.000,00	99,40%
a. Tercapainya penguatan kelembagaan gender, perlindungan perempuan dan anak melalui:seminar peringatan hari ibu, sosialisasi pencegahan KTPA, seminar Three Ends, pelatihan pendampingan korban kekerasan, sosialisasi Tree Ends di 5 Kecamatan		1049 orang	1049 orang	100%
Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan	98.590.000,00		98.590.000,00	100%

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) - 2017

1. Pengembangan dan Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender	98.590.000,00		98.590.000,00	100%
a. Terpenuhinya implementasi keterwakilan gender pada kegiatan pembangunan sebesar 30%		2 Dinas /Instansi	2 Dinas /Instansi	100%

Tabel 3.8. Capaian Kinerja Bidang Perlindungan Anak (PA)

Program Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	470.000.000,00		462.312.000,00	98,36%
1. Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2TP2A)	193.811.000		192.581.000,00	99,37%
a. Tertanganinya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak		60 Kasus	60 Kasus	71,67%
b. Tersampainya informasi tentang hak hak anak		400 Anak	400 Anak	100%
c. Tersosialisasikannya program nasional three Ends		3 SMA/SMK	3 SMA/SMK	100%
2. Pembentukan Kawasan Percontohan RW Layak Anak Tingkat Kelurahan	126.189.000		125.949.000	99,81%
a. Terbentuknya RW layak anak		2 RW	5 RW	250%
3. Peningkatan Peran Wanita menuju Keluarga Sehat dan Sejahtera (P2WKSS)	150.000.000,00		143.782.000,00	95,85%
a. Terbinanya kelurahan P2WKSS		1 Kel	1 Kel	100%
b. Terpeliharannya rumah KK binaan P2WKSS		100 KK	100 KK	100%
c. Tersediaanya laporan data akhir P2WKSS		1 Dok	1 Dok	100%
Capaian Rata-Rata Seluruh Kegiatan				100%

Berdasarkan data pada tabel di atas, terlihat bahwa capaian kinerja dari program dan kegiatan untuk menunjang pelaksanaan Misi II secara rata-rata mencapai 100% atau terealisasi sesuai target dengan klasifikasi “Baik”. Realisasi kinerja semua kegiatan sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

Misi 3, strategi:

- a. Peningkatan keberdayaan masyarakat
 2. Pembinaan dan pemberian modal simulan.
- d. Pembentukan posyantek dan wartek di Kecamatan.
 1. Menetapkan dan membentuk posyantek dan wartek disetiap Kecamatan.

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) - 2017

- e. Pemberian makanan tambahan bagi anak sekolah SD/MI, PAUD, BKB Kemas
1. Menetapkan SD/MI, PAUD, BKB Kemas terpilih
 - a. Penguatan kapasitas kelompok UP2K
 1. Menetapkan UP2K terpilih
 - b. Peningkatan sarana dan prasarana posyandu
 1. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana posyandu
 - c. Peningkatan Kinerja aparatur kelurahan dengan penyelenggaraan pemerintahan kelurahan yang baik
 1. Meningkatkan kualitas dan fasilitasi administrasi aparatur serta peningkatan proporsi pembiayaan pembangunan yang berasal dari musrenbang kecamatan.
 - d. Peningkatan swadaya masyarakat melalui BBGRM, Bhakti TNI Satata Sariksa, Penunjang Bantuan RW.
 1. Melaksanakan sosialisasi, pembinaan dan pencaanangan BBGRM, Bhakti TNI, Penunjang Bantuan RW, serta melaksanakan gerakan kesadaran masyarakat terhadap lingkungan.
 - e. Peningkatan kemandirian LKK melalui vitalisasi kinerja LKK
 1. Melaksanakan sosialisasi pembinaan dan lomba LKK terbaik.

Tabel 3.9. Capaian Kinerja Bidang Pemberdayaan Masyarakat (PM)

Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Kelurahan	301.566.100,00		276.209.100,00	91,59
1. Pemasyarakatan & Pemanfaatan TTG	95.476.000,00		89.404.000,00	93,64%
a. Terbentuknya wartek		2 Wartek Paket pameran	2 Wartek Paket pameran	100%
b. Tereksposnya kreasi TTG kota Cirebon di tingkat propinsi		1	1	100%
2. Pembinaan Posyandu Tingkat Kota	206.090.100,00		186.805.100,00	90,64%
a. Meningkatnya strata posyandu mandiri		1 Stara Posyandu mandiri	1 Stara Posyandu mandiri	100%
b. Rakor pokjanal Tk. Kota		3 Kali	3 Kali	100%
c. Lomba Posyandu Tk. Kota		1 Kali	1 Kali	100%
d. Lomba posyandu Tk. Propinsi		1 Kali	1 Kali	100%

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) - 2017

e.	Olimpiade kader posyandu Tk. Propinsi		1 Kali	1 Kali	100%
Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Kelurahan		79.655.000,00		79.265.000,00	99,51%
1.	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Bantuan RW	79.655.000,00		79.265.000,00	
a.	Tersalurkannya bantuan hibah operasional fisik & non fisik RW		248 RW	248 RW	100%
b.	Tersalurkannya bantuan hibah operasional RT		1366 RT	1366 RT	100%
c.	Tersalurkannya bantuan hibah operasional LPM		22 LPM	22 LPM	100%
d.	Tersusunnya laporan monev bantuan hibah operasional fisik & non fisik RW		1 Dok	1 Dok	100%
Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Kelurahan/Kecamatan		416.750.000,00		412.671.500,00	99,02%
2	Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat	150.000.000,00		147.106.500,00	98,07%
a.	Termonitorinya kegiatan BBGRM		1 Kali	1 Kali	100%
b.	Terfasilitasinya pencanangan BBGRM tk. Kota		1 Keg	1 Keg	100%
c.	Terfasilitasinya pelatihan kader pemberdayaan masyarakat (KPM)		22 Org	22 Org	100%
3	Bhakti TNI Pola Manunggal Satata Sariksa	166.750.000,00		166.000.000,00	99,55%
a.	Tersediaanya laporan akhir kegiatan Bhakti TNI Manunggal Satata Sariksa		6 Buku	6 Buku	100%
b.	Tersediaanya jalan perbatasan surapandan-cibogo		2X200 M2	2X200 M2	100%
c.	Terfasilitasinya pemberian sembako & penyuluhan bagi warga sekitar		100 Org	100 Org	100%
4	Peningkatan Peran Masyarakat Melalui Bhakti Siliwangi Manunggal Satata Sariksa (BSMSS) (Dana Provinsi)	100.000.000,00		99.565.000,00	99,57%
a.	Tersediaanya bahan bangunan untuk kegiatan BSMSS		1 Paket	1 Paket	100%
b.	Terlaksananya kegiatan BSMSS		100 %	100 %	100%
Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Kelurahan		287.472.000,00		280.550.700,00	97,59%
1	Lomba Kelurahan Tingkat Kota	73.672.000,00		68.120.000,00	92,46%
a.	Meningkatnya pengetahuan & kemampuan pelayanan aparatur pemerintah kecamatan & kelurahan		4 Kel	4 Kel	100%

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) - 2017

2	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Administrasi Kelurahan	213.800.000,00		212.430.700,00	99,36%
a	Tersediaanya Dok Monev kelurahan		2 Kali	2 Kali	100%
b	Tersedianya Dok Pembinaan hasil monev		2 Kali	2 Kali	100%
c	Tersediannya Dok Raker Lurah Camat		1 Kali	1 Kali	100%
	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan	511.555.000,00		499.289.150,00	97,60%
1	Lokakarya dan Vitalisasi Kinerja LKK	81.555.000,00		81.555.000,00	100%
a	Tercapainya wawasan pengurus LPM se Kota Cirebon		22 LPM	22 LPM	100%
b	Terbentuknya dan terlatihnya kepengurusan karang taruna se Kota Cirebon		22 Kel	22 Kel	100%
c	Tersediaanya laporan akhir kegiatan		1 Dok	1 Dok	100%
2	Pembinaan LKK	430.000.000,00		417.734.150,00	97,15%
a	Terlatihnya kelompok PKK yang tertib administrasi di Kecamatan		5 Kecamatan	5 Kecamatan	100%
b	Terlatihnya kelompok PKK yang tertib administrasi di kelurahan		22 Kelurahan	22 Kelurahan	100%
c	Tersediaanya Lap Work Shop		2 Dok	2 Dok	100%
d	Terlatihnya kelompok PKK kecamatan & kelurahan yang tertib administrasi		44 Kali	44 Kali	100%
e	Terpenuhnya pelaksanaan Work Shop		2 Kali	2 Kali	100%
f	Terpenuhnya pengiriman kader ke jambore PKK tk. Kota		1 Kali	1 Kali	100%
g	Terpenuhnya pelaksanaan pembinaan kader di tk. Provinsi		1 Kali	1 Kali	100%
Capaian Rata-Rata Seluruh Kegiatan					100%

Berdasarkan data pada tabel di atas, terlihat bahwa capaian kinerja dari program dan kegiatan untuk menunjang pelaksanaan Misi II secara rata-rata mencapai 100% atau terealisasi sesuai target dengan klasifikasi “Baik”. Realisasi kinerja semua kegiatan sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

3.2. Realisasi Anggaran

Pengukuran inerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Cirebon dilakukan dengan membandingkan anggaran dan realisasi anggaran yang digunakan oleh masing-masing kegiatan sebagai input kegiatan. Anggaran dan realisasi anggaran bersumber APBD Kota Cirebon pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Cirebon tahun 2017 dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.8. Realisasi Anggaran Keseluruhan Tahun 2017

No.	Belanja	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
1	Belanja Tidak Langsung	4.123.846.000,00	3.987.997.794,00	96,71%
2	Belanja Langsung	4.743.919.889,00	4.595.999.586,55	94,55%
Jumlah		8.867.765.889,00	8.583.997.380,55	96,80%

Sumber : Sub Bagian Keuangan (2017)

Pada tabel di atas, terlihat realisasi total anggaran pada Tahun 2017 ini sebesar Rp 8.583.997.380,55 atau 96,80% dari total anggaran yang ada bahwa tingkat penyerapan keseluruhan anggaran, yang terdiri dari belanja langsung maupun tidak langsung melebihi 85% atau dapat diklasifikasikan “baik”.

Uraian pencapaian dari Belanja Langsung pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun Anggaran 2017, dapat dilihat dari masing-masing kegiatan dan program yang membidangnya sebagai berikut :

Tabel 3.9. Realisasi Anggaran Belanja Langsung Tahun 2017

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian	Sisa Pagu Anggaran (Rp)	% Efisiensi
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
URUSAN SOSIAL						
I.	Program pelayanan administrasi perkantoran	808.693.289,00	766.213.833,00	94,7%	42.479.456,00	5,25%
1	Penyediaan Jasa Kbersihan Kantor	156.145.500,00	155.845.500,00	99,81%	300.000,00	0,19%
2	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - undangan	25.200.000,00	25.200.000,00	100%	0	0
3	Penjilidan Makanan Dan Minuman	43.784.500,00	42.141.900,00	92,25%	1.642.600,00	3,75%

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) - 2017

4	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	307.375.000,00	290.269.634,00	94,44%	17.105.366,00	5,56%
5	Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor	58.162.500,00	56.982.500,00	97,97%	1.180.000,00	
6	Penyediaan Jasa Surat Menyurat, AATK, Barang Cetak dan Penggandaan	88.098.100,00	84.847.600,00	96,34%	3.250.500,00	2,02%
7	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dan Logistik	91.965.189,00	77.663.899,00	84,34%	14.301.290,00	15,55%
8	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional dan Jaminan Bang Milik Daerah	37.962.500,00	33.362.800,00	87,88%	459.970.00,00	1,12%
II.	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	382.137.000,00	350.448.950,00	91,7%	3.168.805,00	8,29%
1	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	28.380.600,00	28.280.600,00	100%	2.828.060.000,00	8,02%
2	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional/Jabatan	64.849.000,00	61.750.000,00	95,22%	309.900.000,00	4,77%
3	Pengadaan Perlengkapan/Peralatan Gedung Kantor	135.137.400,00	132.285.000,00	97,89%	285.240.000,00	2,11%
4	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional/Jabatan	130.770.000,00	105.033.350,00	80,32%	25.736.650,00	19,68%
5.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan/Peralatan Gedung Kantor	23.000.000,00	23.000.000,00	100%	0	0
III.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	66.025.000,00	58.919.000,00	89,24%	7.106.000,00	10,76%
1.	Pengadaan Pemakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	66.025.000,00	58.919.000,00	89,24%	7.106.000,00	10,76%
IV.	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	235.398.000,00	229.093.000,00	97,32%	6.305.000,00	2,67%
1	Penyusunan Pelaporan Capaian Kinerja dan Ikhtidar Reabilitas Kinerja SKPD	52.724.000,00	52.724.000,00	100,%	0	0
2	Penyusunan RKA/DPA SKPD dan Perubahannya	50.880.000,00	44.897.000,00	88,24%	5.983.000,00	11,76%
3	Penyusunan dan Publikasi Profil SKPD	48.157.000,00	47.835.000,00	100%	334.000,00	0,69%
4	Penyusunan Pelaporan Keuangan SKPD	43.375.000,00	43.375.000,00	100%	0	0
5	Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD	33.255.000,00	33.255.000,00	100%	0	0
6	Penyusunan Pedoman Kinerja SKPD	7.007.000,00	7.007.000,00	100%	0	0
V.	Program pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial	659.000.000,00	653.963.000,00	99,23%	5.037.000,00	0,76%
1	Pelayanan dan Perlindungan Sosial, Hukum bagi Korban Eksploitasi, Perdagangan Perempuan dan Anak	50.000.000,00	50.000.000,00	100%	0	0

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) - 2017

2	Peningkatan kualitas pelayanan sarana dan prasarana rehabilitasi kesejahteraan sosial bagi PMKS	53.000.000,00	52.785.000,00	99,59%	215.000,00	0,4%
3	Program keluarga harapan	450.000.000,00	445.440.000,00	98,99%	4.560.000,00	1,01%
4	Pengembangan dan Pemberdayaan Kesejahteraan Sosial	53.000.000,00	53.000.000,00	100%	0	0
5	Jaminan Sosial Bagi PMKS	53.000.000,00	52.000.000,00	99,91%	1.000.000,00	1,88%
VI.	Program Penguatan Jejaring Kemitraan Dalam Rangka Penanganan PMKS	121.000.000,00	121.000.000,00	100%	0	0
1.	Penigkatan jejaring Kerjasama palku-pelaku usaha Kesejahteraan Sosial masyarakat	70.000.000,00	70.000.000,00	100%	0	0
2.	Peningkatan Pelestarian Nilai – Nilai Kepahlawanan dan Kesetiakawanan Sosial	51.000.000,00	51.000.000,00	100%	0	0
VII.	Program Penanggulangan Korban Bencana	34.668.500,00	33.502.000,00	96,64%	1.166.500,00	3,36%
1	Penanggulangan maaslah – masalah strategi yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar Biasa	34.668.500,00	33.502.000,00	96,64%	1.166.500,00	3,36%
VIII.	Program Satu Data Keluarga Miskin	70.000.000,00	70.000.000,00	100%	70.000.000,00	100%
1	Penyusunan Data PMKS dan PSKS	70.000.000,00	70.000.000,00	100%	70.000.000,00	100%
IX.	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamakan Gender dan Anak	201.410.000,00	200.210.000,00	99,40%	1.200.000,00	0,59%
1.	Penguatan Kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak	201.410.000,00	200.210.000,00	99,40%	1.200.000,00	0,59%
X.	Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan	98.590.000,00	98.590.000,00	100%	98.590.000,00	100%
1.	Pengembangan dan Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender	98.590.000,00	98.590.000,00	100%	98.590.000,00	100%
XI.	Program Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	470.000.000,00	462.312.000,00	98,36%	7.688.000,00	1,63%
1.	Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2TP2A)	193.189.000,00	192.581.000,00	99,37%	608.000,00	0,31%
2.	Pembentukan Kawasan Percontohan RW Layak Anak Tingkat Kelurahan	126.189.000,00	125.949.000,00	91,81%	240.000,00	0,19%
3.	Peningkatan Peran Wanita Menuju Keluarga Sehat dan Sejahtera (P2WKSS)	150.000.000,00	143.782.000,00	95,85%	6.218.000,00	4,14%
XII.	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Kelurahan	301.566.100,00	276.214.100	91,59%	25.352.000,00	8,40%
1.	Permasyarakatan & Pemanfaatan TTG	95.476.000,00	89.409.000,00	93,64%	6.067.000,00	6,35%

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) - 2017

2.	Pembinaan Posyandu Tingkat Kota	206.090.100,00	186.805.100,00	90,64%	19.285.000,00	9,35%
XIII.	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Kelurahan	496.405.000,00	481.935.500,00	97,08%	14.469.500,00	2,9%
1.	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Bantuan RW	79.655.000,00	79.265.000,00	99,51%	390.000,00	0,49%
2.	Bulan Bakti Gotong Rorong Masyarakat	150.000.000,00	147.105.500,00	98,07%	2.894.500,00	1,92%
3.	Bhakti TNI Pola Manunggal Satata Sariksa	166.750.000,00	166.000.000,00	99,55%	750.000.000,00	0,44%
4.	Peningkatan Peran Masyarakat Melalui Bhakti Siliwangi Manunggal Satata Sariksa (BSMSS) (Dana Provinsi)	100.000.000,00	89.565.000,00	99,57%	10.435.000,00	10,43%
XIV.	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Kelurahan	301.566.100,00	280.550.700,00	93,03%	21.015.400,00	6,97%
1.	Lomba Kelurahan Tingkat Kota	73.672.000,00	68.120.000,00	92,46%	5.552.000,00	7,53%
2.	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Administrasi Kelurahan	213.800.000,00	212.430.700,00	99,36%	1.369.300,00	0,64%
XV.	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan	511.555.000,00	499.289.150,00	97,60%	12.265.850,00	2,39%
1.	Lokakarya dan Vitaslisasi Kinerja LKK	81.555.000,00	81.555.000,00	100%	0	0
2.	Pembinaan LKK	430.000.000,00	417.734.150,00	97,15%	12.265.850,00	2,85%
JUMLAH						

Sumber : Sub Bagian Keuangan (2017)

Berdasarkan data pada Tabel 3.9, terlihat bahwa pencapaian total anggaran sebesar 96,80%, yang berarti terdapat efisiensi ketidakserapan anggaran sebesar 3,2%.

Perincian anggaran yang tidak terserap oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebesar Rp 151.682.656,00,- atau sebesar 3,19% adalah sebagai berikut :

- 1) Program pelayanan administrasi perkantoran direalisasikan sebesar 99,81%. Hal ini terjadi dikarenakan penyerapan anggaran rutin baik yang melalui UP/GU maupun LS-BJ diakibatkan adanya selisih sebagai dampak harga negoisasi dan perubahan yang diluar kendali SKPD maupun sebab lain dari masing-masing kegiatan yang ada di program ini, dengan penjelasan sebagai berikut :
 - a). Penyediaan jasa kebersihan kantor direalisasikan sebesar 99,81% atau Rp 300.000,00 ketidak serapan anggaran disebabkan karena efisiensi harga penawaran.
 - b). Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan telah direalisasikan sebesar 100%.

- c). Penyediaan Makanan dan Minuman telah direalisasikan sebesar 96,25% atau Rp 1.642.600,00 disebabkan karena efisiensi harga penawaran.
 - d). Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah atau Rp 300.000,00- ketidak serapan anggaran terjadi pada mata belanja biaya pengiriman dokumen, hal ini disebabkan karena efisiensi harga penawaran.
 - e). Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor telah direalisasikan sebesar 97,97% atau Rp 1.180.000,00 disebabkan karena efisiensi harga penawaran.
 - f). Penyediaan Jasa Surat Menyurat, ATK Barang Cetak dan Penggandaan telah direalisasikan sebesar 96,31% atau Rp 3.250.500,00 disebabkan karena efisiensi harga penawaran.
 - g). Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dan Logistik telah direalisasikan sebesar 84,34% atau Rp 14.401.290,00 disebabkan karena efisiensi harga penawaran.
 - h). Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional dan Jaminan Barang Milik Daerah telah direalisasikan sebesar 87,88% atau Rp 4.599.700,00 disebabkan karena efisiensi harga penawaran.
- 2) Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur, penyerapan anggaran baru mencapai 97,7%, dengan sisa anggaran sebesar Rp 3.168.805,00 dari anggaran Rp 382.137.000,00 dengan penjelasan sebagai berikut
- a) Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor telah direalisasikan sebesar 100%.
 - b) Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional/Jabatan telah direalisasikan sebesar 95,22% atau Rp3.099.000,00 disebabkan karena efisiensi harga penawaran.
 - c) Pengadaan Perlengkapan/Peralatan Gedung Kantor telah direalisasikan sebesar 97,89% atau Rp2.852.400,00 disebabkan karena efisiensi harga penawaran.
 - d) Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional/Jabatan telah direalisasikan sebesar 80,32% atau Rp25.736.650,00 disebabkan karena efisiensi pembelian BBM disesuaikan dengan Fluktuasi harga Pertamina.

- e) Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan/Peralatan Gedung Kantor telah direalisasikan sebesar 100%.
- 3) Program peningkatan Disiplin Aparatur, penyerapan anggaran baru mencapai 89,24%, dengan sisa anggaran sebesar Rp 7.106.000,00 dari anggaran Rp 66.025.000,00 dengan penjelasan sebagai berikut:
- a) Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya telah direalisasikan sebesar 89,24% atau Rp7.106.000,00 disebabkan karena efisiensi harga penawaran.
- 4) Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan, direalisasikan sebesar Rp. 97,32%, dengan sisa sebesar Rp. 6.305.000,00 Sisa anggaran tersebut dikarenakan pada Kegiatan Penyusunan RKA/DPA SKPD belum adanya jadwal penyusunan DPA Tahun Anggaran 2018 sampai dengan akhir Desember 2017, sehingga Makanan dan Minuman (MAMIN) pada Kegiatan Penyusunan DPA Tahun Anggaran 2017 pada Kegiatan Penyusunan RKA/DPA SKPD dan Perubahannya tidak terserap.
- 5) Program pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial, penyerapan anggaran sebesar 99,23%, dengan sisa anggaran sebesar Rp. 5.037.000,00 dengan penjelasan sebagai berikut :
- a). Kegiatan Pelayanan dan Perlindungan Sosial, Hukum Bagi Korban Eksploitasi, Perdagangan Perempuan dan Anak terealisasi sebesar 100%.
- b). Kegiatan Peningkatan Kualitas Pelayanan, Sarana, dan Prasarana Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Bagi PMKS terealisasi sebesar 99,59%. Sisa anggaran yang tidak diserap disebabkan oleh harga negoisasi pengadaan LS-BJ/efisiensi harga penawaran.
- c). Kegiatan Jaminan Sosial Bagi Anak Terlantar dan PMKS Terlantar terealisasi sebesar 99,51%. Sisa anggaran yang tidak diserap disebabkan oleh harga negoisasi pengadaan LS-BJ/efisiensi harga penawaran.
- d). Kegiatan Program Keluarga Harapan terealisasi sebesar 99,22%. Sisa anggaran yang tidak diserap disebabkan oleh harga negoisasi pengadaan LS-BJ.
- e). Pengembangan dan Pemberdayaan Kesejahteraan Sosial terealisasi sebesar 100%.

- 6) Program Penguatan Jejaring Kemitraan Dalam Rangka Penanganan PMKS, penyerapan anggaran sebesar 100%, dengan penjelasan sebagai berikut :
 - a). Kegiatan Peningkatan jejaring kerjasama pelaku-pelaku usaha kesejahteraan sosial masyarakat terealisasi sebesar 100%.
 - b). Kegiatan Pelestarian Nilai-Nilai Kepahlawanan dan Kesetiakawanan Sosial terealisasi sebesar 100%.
- 7) Program Penanggulangan Korban Bencana, penyerapan anggaran sebesar 96,64%, dengan penjelasan sebagai berikut :
 - a).Kegiatan penanggulangan masalah-masalah strategi yang cepat darurat dan kejadian luar biasa terealisasi sebesar 96,64 %. Sisa anggaran yang tidak diserap disebabkan oleh harga negoisasi pengadaan LS-BJ/Efisiensi harga penawaran.
- 8) Program Satu Data Keluarga Miskin, penyerapan anggaran sebesar 100%, dengan penjelasan sebagai berikut :
 - a). Kegiatan penyusunan Data PMKS dan PSKS terealisasi sebesar 100 %.
- 9) Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamakan Gender dan Anak, penyerapan anggaran sebesar 99,40%, dengan penjelasan sebagai berikut :
 - a). Kegiatan penguatan kelembagaan pengarusutamakan gender dan anak terealisasi sebesar 99,40 %. Sisa anggaran yang tidak diserap disebabkan oleh harga negoisasi pengadaan LS-BJ/Efisiensi harga penawaran.
- 10) Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan, penyerapan anggaran sebesar 100%, dengan penjelasan sebagai berikut :
 - a) Kegiatan pengembangan dan peningkatan peran serta dan kesetaraan gender terealisasi sebesar 100 %. Sisa anggaran yang tidak diserap disebabkan oleh harga negoisasi pengadaan LS-BJ/Efisiensi harga penawaran.
- 11) Program Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, penyerapan anggaran sebesar 98,36%, dengan penjelasan sebagai berikut :
 - a). Kegiatan pengembangan pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak (P2TP2A) terealisasi sebesar

98,36%. Sisa anggaran yang tidak diserap disebabkan oleh SILPA dari Mamin anak yang diamankan di P2TP2A.

b). Kegiatan pembentukan kawasan percontohan RW layak anak tingkat kelurahan terealisasi sebesar 99,81 %. Sisa anggaran yang tidak diserap disebabkan Kesalahan dalam mencantumkan besaran untuk mamin volume 2 di anggaran DPA seharusnya 1x.

c). Kegiatan peningkatan peran wanita menuju keluarga sehat dan sejahtera (P2WKSS) terealisasi sebesar 95,85 %. Sisa anggaran yang tidak diserap disebabkan efisiensi harga penawaran (bahan baku bangunan untuk 100KK binaan di lokasi P2WKSS).

12) Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Kelurahan, penyerapan anggaran sebesar 91,59%, dengan penjelasan sebagai berikut :

a). Kegiatan pemasyarakatan & pemanfaatan TTG terealisasi sebesar 93,64%. Sisa anggaran yang tidak diserap disebabkan oleh efisiensi dari kegiatan pameran (swakelola).

b). Kegiatan pembinaan posyandu tingkat kota terealisasi sebesar 90,64%. Sisa anggaran yang tidak diserap disebabkan Rakor Pokjanal untuk 331 Posyandu dan Lomba Posyandu Tingkat Kota untuk 331 Posyandu.

13) Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Kelurahan, penyerapan anggaran sebesar 97,08%, dengan penjelasan sebagai berikut :

a). Kegiatan koordinasi, monitoring dan evaluasi bantuan rw terealisasi sebesar 99,51%. Sisa anggaran yang tidak diserap disebabkan oleh adanya pemekaran RT sehingga RT bertambah dari 1366 menjadi 1368 dan monev adalah monev pendataan calon penerima bantuan hibah.

b). Kegiatan bulan bakti gotong royong masyarakat terealisasi sebesar 98,07%. Sisa anggaran yang tidak diserap disebabkan pelaksanaan monitoring BBGRM dilaksanakan 22 kelurahan.

c) Kegiatan Bhakti TNI Pola Manunggal Satata Sariksa terealisasi sebesar 99,55%. Sisa anggaran yang tidak diserap disebabkan disebabkan oleh harga negoisasi pengadaan LS-BJ/Efisiensi harga penawaran.

d) Kegiatan Peningkatan Peran Masyarakat melalui Bhakti Siliwangi Manunggal Satata Sariksa (BSMSS) (Dana Provinsi) terealisasi

sebesar 99,57%. Sisa anggaran yang tidak diserap disebabkan disebabkan oleh harga negoisasi pengadaan LS-BJ/Efisiensi harga penawaran.

- 14) Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Kelurahan, penyerapan anggaran sebesar 97,08%, dengan penjelasan sebagai berikut :
 - a). Kegiatan kelurahan tingkat kota terealisasi sebesar 92,46%. Sisa anggaran yang tidak diserap disebabkan efisiensi dari fasilitasi lomba tingkat propinsi.
 - b). Kegiatan koordinasi, monitoring dan evaluasi administrasi kelurahan terealisasi sebesar 99,36%. Sisa anggaran yang tidak diserap disebabkan Sisa anggaran yang tidak diserap disebabkan disebabkan oleh harga negoisasi pengadaan LS-BJ/Efisiensi harga penawaran.
- 15) Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan, penyerapan anggaran sebesar 97,60%, dengan penjelasan sebagai berikut :
 - a). Kegiatan lokakarya dan vitalisasi kinerja LKK terealisasi sebesar 100%.
 - b). Kegiatan pembinaan LKK terealisasi sebesar 97,15%. Sisa anggaran yang tidak diserap disebabkan Sisa anggaran yang tidak diserap disebabkan efisiensi dari kegiatan Jambore Kader PKK Tk. Provinsi.

BAB IV
PENUTUP

Berdasarkan hasil pengukuran evaluasi dan analisis pencapaian sasaran strategik, dapat diperoleh hasil evaluasi kinerja yang menunjukkan bahwa dari 6 indikator sasaran yang ditetapkan dalam Renstra 2013 – 2018, terdapat 5 (lima) indikator yang memenuhi target Renstra, yaitu:

(1) Meningkatnya keterwakilan gender 30% dalam pembangunan, Rasio RW layak anak per kelurahan, Penanganan pengaduan, artinya Terfasilitasinya pengaduan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak dengan indikator kinerja Meningkatnya keterwakilan gender 30% dalam pembangunan, Rasio RW layak anak per kelurahan, Penanganan pengaduan dengan target 3%, 2RW/22 kel/100 KK Binaan, 60 Kasus terealisasi 30%, 5 RW/22 kel/100KK binaan, 53 kasus, artinya dengan realisasi :

Terpenuhinya implementasi keterwakilan gender pada kegiatan pembangunan sebesar 30% dengan target terpenuhinya keterwakilan perempuan disektor publik, yaitu:

1. Perempuan menduduki jabatan strategis/pengambil keputusan, untuk eksekutif sebesar 43%.
2. Perempuan di parlemen sebesar 26%.
3. Perempuan di sektor yudikatif sebesar 4%.

Peningkatan peran perempuan dalam pembangunan pada kelurahan lokasi P2WKSS sebanyak 100KK binaan dan 20 kader perempuan sebagai motor penggerak pembangunan.

Terbentuknya RW layak anak targetnya 2 RW realisasinya mencapai 5 RW yaitu di RW 10 Kel. Kesenden, RW 13 Kel.Pegambiran, RW 10 Kel. Pekiringan, RW 03 Kel. Pekalipan dan RW 06 Kel. Harjamukti sehingga prosentasenya mencapai 250%.

terfasilitasinya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak pada tahun 2016 sebesar 82,73% dalam penanganan pengaduan yang mengalami penurunan di Tahun 2017 sebesar 71,67% yang tertangani, akan tetapi berbanding proposional dengan target yang telah ditetapkan, Tertanganinya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak sebanyak

53 kasus, yang terdiri dari 17 orang kekerasan perempuan dan 36 kasus kekerasan pada anak.

Terbentuknya RW layak anak targetnya 2 RW realisasinya mencapai 5 RW yaitu di RW 10 Kel. Kesenden, RW 13 Kel. Pegambiran, RW 10 Kel. Pekiringan, RW 03 Kel. Pekalipan dan RW 06 Kel. Harjamukti sehingga persentasenya mencapai 250%.

- (2) Berkembangnya lembaga ekonomi kelurahan terealisasi 100% yaitu 1 wartek dari target 1 wartek.
- (3) Meningkatnya pengetahuan dan kemampuan pelayanan aparatur pemerintahan kecamatan dan kelurahan terealisasi 100% dari target 4 kelurahan terealisasi 4 kelurahan.
- (4) Target Kinerja untuk tahun 2017 yaitu meningkatnya partisipasi masyarakat dalam bantuan RW dengan target 10 % dari nilai bantuan RW sebesar Rp. 20.000.000/RW sebanyak 248 RW. Nilai partisipasi masyarakat yang terhimpun dari 248 RW pada Tahun 2017 yaitu rata-rata Rp. 2.000.000/RW dengan total swadaya masyarakat se-Kota Cirebon sebesar Rp. 495.000.000.

Capaian Indikator Kinerja stimulan/partisipasi masyarakat dalam bantuan RW pada tahun 2017 yaitu $\text{Rp. 2.000.000 / Rp. 20.000.000} \times 100 = 10 \%$.

- (5) Meningkatnya kemandirian pengurus LKK yaitu rasio jumlah pengurus LKK yang dibina target 30% terealisasi sebesar 30% Capaian target kinerja tahun 2017 yaitu jumlah LKK yang dibina pada tahun 2017 adalah sejumlah 1672 dari 1689 LKK yang berada di Kota Cirebon (yang tidak dibina yaitu 17 Karang Taruna yang tidak aktif) sehingga capaian tahun 2017 yaitu sebesar 98,9% sudah melebihi target pada tahun 2017 yaitu 30% LKK yang dibina.

Ada 2 (dua) indikator lain tidak mencapai target, yaitu menurunnya jumlah PMKS, dari target turun sebesar 1%, terealisasi naik sebesar 0,744% dan penanganan pengaduan Tertanganinya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak sebanyak 53 kasus, yang terdiri dari 17 orang kekerasan perempuan dan 36 kasus kekerasan pada anak. Kondisi ini lebih kecil dari target yang ditetapkan yaitu sebanyak 60 kasus. Sehingga perhitungan realisasinya menggunakan rumus “indikator bermakna negative” dan didapatkan hasil realisasinya sebesar 71,67%.

Dengan melihat hasil analisis kinerja juga diketahui bahwa capaian akhir kinerja pencapaian sasaran Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Cirebon Tahun 2017 sebesar 96,80% atau dengan kualifikasi “Baik”. Sedangkan pencapaian anggaran sebesar 93,64%, juga dengan kualifikasi “Baik”.

- 1) Misi I, yaitu meningkatkan kualitas penanganan Masalah Kesejahteraan Sosial, memiliki nilai capaian kinerja sebesar 99,33% untuk bidang sosial dan 95,01% untuk kesekretariatan;
- 2) Misi II, yaitu meningkatkan kualitas hidup perempuan dan anak , memiliki nilai capaian kinerja sebesar 99,40% untuk bidang pemberdayaan perempuan (PP), dan capaian kinerja sebesar 98,37 untuk bidang perlindungan anak (PA).
- 3) Misi III, yaitu sebesar 93,64% meliputi:
 - a. Peningkatan keberdayaan masyarakat
 1. Pembinaan dan pemberian modal simulan.
 - b. Pembentukan posyantek dan wartek di Kecamatan.
 1. Menetapkan dan membentuk posyantek dan wartek di setiap Kecamatan.
 - c. Pemberian makanan tambahan bagi anak sekolah SD/MI, PAUD, BKB Kemas
 1. Menetapkan SD/MI, PAUD, BKB Kemas terpilih
 - d. Penguatan kapasitas kelompok UP2K
 1. Menetapkan UP2K terpilih
 - e. Peningkatan sarana dan prasarana posyandu
 1. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana posyandu
 - f. Peningkatan Kinerja aparatur kelurahan dengan penyelenggaraan pemerintahan kelurahan yang baik
 1. Meningkatkan kualitas dan fasilitasi administrasi aparatur serta peningkatan proporsi pembiayaan pembangunan yang berasal dari musrenbang kecamatan.
 - g. Peningkatan swadaya masyarakat melalui BBGRM, Bhakti TNI Satata Sariksa, Penunjang Bantuan RW.
 1. Melaksanakan sosialisasi, pembinaan dan pencahangan BBGRM, Bhakti TNI, Penunjang Bantuan RW, serta melaksanakan gerakan kesadaran masyarakat terhadap lingkungan.

h. Peningkatan kemandirian LKK melalui vitalisasi kinerja LKK

1. Melaksanakan sosialisasi pembinaan dan lomba LKK terbaik.

Di samping tingkat keberhasilan tersebut, ternyata masih terdapat kendala yang berkaitan dengan pencapaian kinerja Dinas, antara lain :

- 1) Terbatasnya kuantitas SDM Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Cirebon jika dibandingkan dengan rasio keluasan tugas-tugas dan permasalahan yang dihadapi yang mencakup bidang pembangunan kesejahteraan sosial maupun pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta bidang pemberdayaan masyarakat, sehingga mempengaruhi efektifitas pelaksanaan tugas.
- 2) Jumlah PMKS yang ditangani sangat banyak, sedangkan belum terintegrasinya program dan kegiatan dengan SKPD lain yang terkait serta belum kuatnya jaringan dengan stakeholder terkait, terutama dengan para Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial;
- 3) Belum terbangunnya sistem integrasi data yang lengkap dan tervalidasi, baik bidang sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta bidang pemberdayaan masyarakat, menyebabkan kesulitan dalam pengambilan keputusan, terutama yang berkaitan dengan data base.

Berdasarkan kendala-kendala yang dihadapi sebagaimana uraian di atas, diharapkan pada penyusunan program dan kegiatan di masa yang akan datang mengacu kepada :

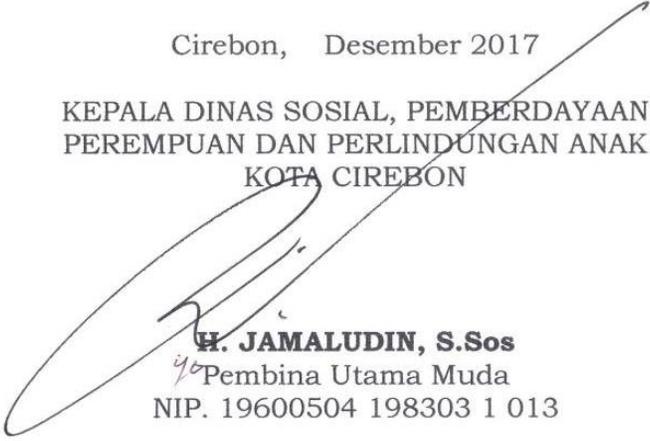
- 1) Mengusulkan penambahan pegawai baru sesuai dengan kebutuhan operasional dan beban kerja Dinas kepada Walikota Cirebon melalui Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah; terutama pegawai pelaksana.
- 2) Melaksanakan koordinasi dengan SKPD dan instansi lain ataupun dengan Badan Usaha dalam integrasi program dan kegiatan, terutama yang menyangkut penanganan PMKS;
- 3) Meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi dan Pusat.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Cirebon tahun 2017 diharapkan dapat memberikan masukan dan pedoman dalam penyusunan program maupun kegiatan khususnya di lingkungan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota

Cirebon dan umumnya pada Pemerintah Kota Cirebon, dimasa yang akan datang.

Cirebon, Desember 2017

KEPALA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KOTA CIREBON



H. JAMALUDIN, S.Sos
Pembina Utama Muda
NIP. 19600504 198303 1 013